

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Analisis Data dengan Nvivo15

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk yang dioperasionalkan secara digital menggunakan perangkat lunak *Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) berupa NVivo 15. Dalam penelitian kualitatif, integrasi perangkat lunak ini menjadi krusial untuk meminimalisir subjektivitas peneliti dan meningkatkan presisi dalam mengorganisir, mengkategorikan, serta memvisualisasikan data teks yang bersumber dari korpus portal resmi *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*.

Proses pengolahan data diawali dengan tahap *importing* korpus data yang terdiri dari puluhan teks berita, terkait isu pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Setelah data terkumpul, dilakukan tahap *word frequency query* untuk memetakan ladang semantik atau tren bahasan secara umum. Selanjutnya, peneliti melakukan tahap manual coding yang ketat, dimana setiap kalimat dibedah dan dimasukkan ke dalam tiga level kategori utama, Mikro, Mezo, dan Makro. Tahapan ini sangat penting untuk melihat bagaimana ideologi besar organisasi Islam dinegosiasikan melalui struktur teks yang tampak sederhana namun sarat akan relasi kuasa.

sangat terpusat pada kebijakan formal negara (*policy-centric*). Munculnya kata Kemaslahatan dan *Affirmative* secara signifikan menegaskan bahwa narasi NU dibangun di atas dasar legitimasi keagamaan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai instrumen pemerataan ekonomi melalui diksi Kesejahteraan dan Keterlibatan. Dominasi kata Eksploitasi dalam korpus NU sering kali diikuti oleh narasi tentang bagaimana mengelola eksploitasi tersebut agar menjadi manfaat melalui mekanisme organisasi. Hal ini mencerminkan kognisi sosial NU yang lebih pragmatis-akomodatif. Dimana, isu lingkungan tetap muncul namun kalah dominan dibandingkan narasi tentang pengelolaan sumber daya untuk kemandirian institusional.

Secara teoritis, perbandingan visual kedua portal ini menunjukkan adanya dikotomi wacana yang tajam. Muhammadiyah membangun “Wacana Perlawanan dan Penjagaan” yang berbasis pada nilai pelestarian, sementara NU membangun “Wacana Akomodasi dan Redistribusi” yang berbasis pada kemaslahatan ekonomi dalam bingkai relasi dengan negara.

4.1.2. Skema Pengkodean

Skema pengkodean dalam penelitian ini disusun sebagai instrumen penyaring epistemologis yang menetapkan batasan kriteria dalam menentukan unit analisis, baik berupa kutipan paragraf, susunan kalimat, maupun pilihan kata spesifik yang diambil dari portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*. Penggunaan perangkat lunak NVivo 15 memfasilitasi peneliti untuk mengintegrasikan kerangka tiga dimensi Teun A. Van Dijk ke dalam skema yang sistematis, dimana setiap kode

berfungsi sebagai parameter untuk mengidentifikasi bahasa sebagai praktik kekuasaan. Rasionalitas utama dalam penetapan skema ini adalah untuk memastikan bahwa peneliti tetap konsisten pada tujuan analisis wacana kritis, yaitu mengungkapkan ideologi dan relasi kuasa di balik teks, sehingga peneliti membatasi diri untuk hanya memilih unit data yang memiliki signifikansi diskursif terhadap isu ekstraktivisme dan kebijakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Peneliti menetapkan skema pengkodean yang bersifat tingkatan dan saling berkaitan antara teks, kognisi, dan konteks sebagai upaya untuk memberikan jalur audit data yang transparan dan reliabel. Melalui skema ini, peneliti dapat melakukan pemetaan yang lebih sesuai mengenai bagaimana sebuah kepentingan organisasi bertransformasi menjadi narasi media melalui proses kognitif para komunikatornya. Hal ini memungkinkan dilakukannya analisis silang (*cross-tabulation*) antar portal guna melihat sejauh mana perbedaan struktur komunikasi organisasi Islam dalam merespons isu ekstraktivisme nasional serta bagaimana masing-masing organisasi memosisikan jati diri keagamaannya di hadapan kebijakan ekonomi negara yang bersifat ekstraktif.



Gambar 1. 5 Skema Pengkodean

4.1.2.1 Level Mikro (Dimensi Teks)

Analisis pada level mikro dirancang untuk menangkap perwujudan ideologi yang tertanam dalam struktur bahasa yang paling eksplisit pada portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*. Node ini digunakan sebagai fondasi bangunan wacana, dimana peneliti membedah bagaimana ideologi ditanamkan ke dalam unit bahasa terkecil melalui strategi pemilihan kata dan penyusunan kalimat yang terencana. Rasionalitas pemilihan unit analisis pada level ini didasarkan pada asumsi linguistik

kritis bahwa bahasa tidak pernah netral,¹⁰⁵ setiap elemen kebahasaan yang muncul di permukaan portal merupakan hasil dari pemilihan sadar atau tidak sadar yang mencerminkan posisi ideologis pembuat teks serta visi organisasi yang diwakilinya.

Lebih lanjut, analisis mikro ini bertujuan untuk mengungkapkan “politik bahasa” yang digunakan oleh organisasi Islam dalam menormalisasi atau mengkritisi isu tambang. Peneliti memfokuskan koding pada bagian teks yang memiliki fungsi semantik untuk mengarahkan opini pembaca, baik melalui strategi penonjolan (*foregrounding*) maupun penyembunyian (*backgrounding*) fakta-fakta tertentu. Dengan membedah aspek mikro ini, peneliti dapat menarik batasan yang jelas mengenai bagaimana struktur bahasa bekerja secara halus untuk membentuk konsensus jemaah tanpa terlihat sebagai sebuah instruksi paksaan, melainkan sebagai sebuah kebenaran moral yang divalidasi oleh pilihan kata dan susunan argumen yang otoritatif.

4.1.2.1.1. Leksikon (Diksi)

Pada bagian leksikon, peneliti menetapkan batasan pemilihan pada pilihan kata yang bermuatan ideologis kuat. Kriteria pelibatan data mencakup kosakata teologis yang digunakan sebagai alat justifikasi atau kritik moral, kosakata ekonomi yang merujuk pada profit atau kesejahteraan, serta kosakata teknokratis yang diadopsi dari terminologi kebijakan pemerintah. Fokus pemilihan diarahkan pada kata-kata yang berfungsi sebagai eufemisme atau pelabelan sakral, seperti

¹⁰⁵ Ria Kasanova et al., *Membongkar Bahasa, Membaca Kuasa (Pengantar Analisis Wacana Kritis)* (CV. Eureka Media Aksara, 2025).

penggunaan kata “Maslahah” untuk memberikan kesan kesucian pada aktivitas industri, atau sebaliknya, penggunaan kosakata risiko seperti “*Mafsadat*” atau “Risiko” untuk memberikan alarm peringatan bagi jemaah.

Peneliti mengamati bagaimana diksi tertentu dipilih secara strategis untuk mengarahkan persepsi pembaca terhadap isu pertambangan yang sering kali dipandang destruktif. Pemilihan kata kunci ini tidak hanya dilihat dari frekuensi kemunculannya semata, melainkan juga dari kemampuannya dalam membingkai (*framing*) isu ekstraktivisme sebagai sebuah kewajiban ekonomi nasional atau beban ekologis yang mengancam masa depan. Dengan membatasi pemilihan pada leksikon yang memiliki pertentangan nilai antara dimensi “manfaat” dan “kerusakan”, peneliti dapat melihat sejauh mana masing-masing portal melakukan normalisasi atau resistensi melalui strategi linguistik yang menyorot kesadaran teologis pembacanya.

4.1.2.1.2. Sintaksis

Kriteria pemilihan unit analisis pada bagian sintaksis ditekankan pada konstruksi kalimat yang menunjukkan strategi penempatan aktor dalam narasi pertambangan. Peneliti mengkodekan kalimat-kalimat yang menggunakan strategi aktif maupun pasif guna mengidentifikasi pendistribusian tanggung jawab dan agensi kekuasaan dalam teks. Rasionalitas pada bagian ini adalah untuk membedah bagaimana pemerintah, pengusaha, dan ormas diposisikan; apakah mereka muncul sebagai subjek aktif yang membawa solusi kesejahteraan, ataukah masyarakat

terdampak justru diposisikan sebagai objek pasif yang hanya menerima dampak kebijakan tanpa memiliki kedaulatan untuk bersuara.

Analisis sintaksis ini juga membatasi pemilihan pada kalimat-kalimat yang memperlihatkan relasi kausalitas atau hubungan sebab-akibat terkait isu tambang dan lingkungan hidup. Peneliti mencari unit bahasa yang memperlihatkan bagaimana struktur kalimat dapat mengaburkan atau justru menonjolkan peran aktor tertentu dalam sebuah peristiwa lingkungan yang kontroversial. Melalui pemetaan sintaksis ini, skema koding bertujuan mengungkap bagaimana portal media ormas mengonstruksi otoritas dan legitimasi melalui penataan kalimat yang menempatkan elit organisasi atau pejabat negara sebagai pusat kendali dalam wacana ekstraktivisme nasional.

4.1.2.1.3. Retorika

Pada elemen retorika, peneliti menetapkan batasan kriteria pada penggunaan gaya bahasa persuasif yang bertujuan memengaruhi kognisi dan emosi pembaca portal. Unit analisis yang dipilih mencakup penggunaan metafora, hiperbola untuk mendramatisasi manfaat ekonomi, serta penggunaan otoritas teologis melalui kutipan ayat suci atau hadis sebagai penutup argumen. Penggunaan teks keagamaan dalam konteks ini tidak dipandang sebagai dakwah normatif biasa, melainkan dikategorikan sebagai alat persuasi diskursif yang difungsikan untuk melegitimasi posisi politik dan kebijakan ekonomi organisasi di hadapan jemaahnya.

Strategi retorik ini dikoding untuk melihat bagaimana organisasi membangun daya tarik moral guna meredam kritik atau membangun dukungan dari konstituen. Peneliti membatasi pemilihan data pada teks-teks yang memperlihatkan adanya upaya persuasi masif yang menghubungkan kepentingan ekonomi organisasi dengan nilai-nilai luhur agama yang sakral. Melalui identifikasi elemen retorik ini, skema koding diharapkan dapat mengungkap sisi persuasif dari wacana ekstraktivisme yang sering kali disamarkan melalui gaya bahasa yang menyentuh sensitivitas spiritual dan identitas keagamaan pembaca, sehingga isu tambang terlihat selaras dengan misi suci organisasi.

4.1.2.2. Level Mezo (Dimensi Kognisi Sosial)

Analisis level mezo berfokus pada dimensi kognisi sosial yang menjadi jembatan antara teks mikro dan konteks sosial makro. Node ini memetakan proses produksi teks yang dipengaruhi oleh struktur internal dan kognisi kolektif organisasi, yang menjelaskan mengapa sebuah teks ditulis dengan gaya, sudut pandang, dan perspektif tertentu. Rasionalitas pada level ini adalah untuk membedah representasi ideologis para komunikator organisasi Islam dalam memahami realitas pertambangan di Indonesia. Peneliti membatasi pemilihan data pada narasi yang memperlihatkan interaksi antara kebijakan organisasi dan proses kreatif penulisan berita di portal-portal resmi guna memahami logika internal organisasi.

Dimensi ini sangat krusial karena teks tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari saringan ideologis para pengelola media organisasi. Peneliti

menganalisis bagaimana norma, nilai, dan kepentingan institusi berkelindan membentuk sebuah pesan yang siap dikonsumsi publik. Dengan membedah level mezo, peneliti dapat mengidentifikasi adanya upaya penyeragaman opini di tingkat pengelola wacana yang kemudian diproyeksikan ke ruang publik untuk menjaga stabilitas internal institusi di tengah kontroversi kebijakan ekstraktif negara.

4.1.2.2.1. Instruksi Organisasi

Batasan pemilihan unit analisis pada bagian instruksi organisasi diarahkan pada narasi yang merefleksikan mandat, sikap resmi, atau birokrasi organisasi dalam merespons isu WIUPK. Peneliti mencari unit teks yang memperlihatkan bagaimana kebijakan dari pucuk pimpinan (PBNU atau PP Muhammadiyah) yang diterjemahkan ke dalam bahasa media portal yang lebih populer untuk dikonsumsi khalayak luas. Kriteria inklusinya meliputi pernyataan-pernyataan yang bersifat mandatori atau penjelasan administratif organisasi yang bertujuan menyeragamkan pemahaman internal terkait sikap institusi terhadap tawaran tambang dari pemerintah pusat.

Node ini berfungsi untuk melihat sejauh mana portal media tersebut bertindak sebagai instrumen sosialisasi kebijakan elit kepada jemaah akar rumput. Peneliti memfokuskan pengkodean pada teks yang menunjukkan adanya penyelarasan antara visi pimpinan organisasi dan narasi yang diproduksi portal, guna memahami bagaimana struktur kekuasaan memengaruhi pola penyampaian informasi keagamaan. Dengan memetakan instruksi organisasi ini, peneliti dapat menarik batasan antara berita yang bersifat informatif murni dengan berita yang

diproduksi sebagai upaya pendisiplinan opini anggota organisasi agar selaras dengan ijtihad pengurus pusat.

4.1.2.2.2. Negosiasi *Green Islam*

Kriteria pemilihan data pada bagian negosiasi *Green Islam* difokuskan pada teks yang memperlihatkan dialektika atau tarik-ulur antara idealisme pelestarian alam dengan tuntutan realitas industri ekstraktif yang masif. Peneliti mencari unit bahasa yang menunjukkan proses negosiasi nilai, dimana prinsip-prinsip “Islam Hijau” dipertahankan secara murni sebagai kritik atau justru mengalami redefinisi dan kompromi demi kepentingan ekonomi organisasi. Batasan pilihannya mencakup teks yang secara eksplisit membahas krisis iklim, pelestarian ekosistem, atau kewajiban teologis terhadap lingkungan hidup dalam perspektif organisasi Islam.

Analisis pada bagian ini bertujuan mengungkap bagaimana doktrin agama dinegosiasikan dengan tawaran kemanfaatan ekonomi yang ditawarkan negara. Peneliti membatasi pemilihan kutipan pada bagian teks yang menunjukkan usaha organisasi dalam mendamaikan dua kepentingan yang sering kali kontradiktif, penjagaan alam sebagai amanah Tuhan dan eksploitasi alam sebagai sumber pendapatan. Melalui koding ini, peneliti dapat melihat sejauh mana ideologi *Green Islam* di dalam tubuh ormas Islam bersifat substantif atau hanya sekadar aksesoris retorik dalam menjustifikasi aktivitas industri yang dijalankan demi menjaga citra organisasi di mata publik.

4.1.2.2.3. Pragmatisme Ekonomi

Node pragmatisme ekonomi menetapkan batasan pemilihan pada narasi yang berkaitan dengan kebutuhan finansial, dana operasional, dan visi kemandirian organisasi melalui akses langsung ke industri pertambangan. Kriteria pemilihan datanya mencakup teks yang membahas kemandirian finansial organisasi, pemberdayaan ekonomi umat melalui tambang, atau pembiayaan layanan sosial keagamaan. Peneliti membedah bagaimana kepentingan materi organisasi dibungkus secara diskursif melalui bahasa dakwah dan pelayanan agar terlihat selaras dengan misi kemanusiaan organisasi tanpa mencederai identitas keagamaan mereka.

Rasionalitas pemilihan unit analisis pada bagian ini adalah untuk mengungkapkan dimensi profit di balik retorika profetik yang sering ditampilkan portal. Peneliti membatasi pemilihan kutipan pada teks yang menunjukkan adanya pergeseran fokus dari idealisme lingkungan ke arah urgensi kebutuhan materi institusional. Dengan memetakan pragmatisme ekonomi ini, skema koding dapat mengungkap bagaimana organisasi membangun pembenaran moral atas keterlibatan ekonomi mereka di sektor ekstraktif dengan mengaitkannya pada keberlanjutan dakwah jangka panjang dan kemandirian institusi di hadapan intervensi pihak luar.

4.1.2.3. Level Makro (Dimensi Konteks Sosial)

Dimensi makro atau konteks sosial berfungsi sebagai node yang menghubungkan wacana di portal dengan struktur sosial yang lebih luas, relasi

kuasa negara, dan dinamika politik di Indonesia. Rasionalitas pada level ini adalah untuk melihat wacana bukan sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah praktik sosial yang berdampak pada masyarakat, kebijakan publik, dan keberlanjutan demokrasi. Peneliti menetapkan kriteria pemilihan data pada teks-teks yang memperlihatkan interaksi intens antara portal ormas Islam dengan aktor eksternal seperti lembaga negara, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil luas.

Pada level ini, analisis diarahkan untuk memahami bagaimana ormas Islam menjalankan peran politik komunikasinya dalam pusaran relasi kuasa nasional. Peneliti memfokuskan pada bagaimana wacana portal digunakan sebagai alat untuk melakukan negosiasi posisi di hadapan negara dan sekaligus sebagai alat untuk memenangkan dukungan publik. Dengan menganalisis dimensi makro, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan antara narasi lingkungan di media ormas dengan struktur kekuasaan yang mengontrol akses terhadap sumber daya alam di Indonesia pasca terbitnya PP No. 25 Tahun 2024.

4.1.2.3.1. Kritik Publik

Kriteria pemilihan unit analisis pada bagian kritik publik diarahkan pada teks yang memperlihatkan bagaimana portal memosisikan diri di hadapan gelombang resistensi atau aspirasi dari masyarakat sipil, aktivis lingkungan, maupun jemaah akar rumput yang kritis. Peneliti menganalisis apakah portal cenderung bersifat defensif dengan menyerang balik narasi pengkritik, kolaboratif dengan memfasilitasi ruang dialog terbatas, atau justru mengabaikan kritik tersebut dengan terus memproduksi narasi tunggal organisasi. Batasan pilihannya adalah

teks yang secara eksplisit atau implisit merespons polemik di ruang publik terkait pemberian izin tambang kepada ormas.

Node ini berfungsi untuk memetakan sensitivitas portal ormas terhadap mekanisme kontrol sosial di era digital. Peneliti memfokuskan pengkodean pada bagaimana kritik masyarakat dikonstruksikan dan dikelola di dalam portal resmi organisasi; apakah kritik tersebut dianggap sebagai masukan konstruktif bagi ijtihad organisasi atau justru dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kewibawaan institusi. Melalui pemetaan ini, peneliti dapat memahami bagaimana portal ormas Islam mengelola tekanan publik dan menjaga batas-batas legitimasi organisasi di tengah derasnya arus kontroversi kebijakan ekstraktif nasional.

4.1.2.3.2. Legitimasi Institusi

Pada bagian legitimasi institusi, peneliti membatasi pemilihan kutipan pada upaya organisasi menggunakan medianya untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan kepercayaan konstituen serta kredibilitas di hadapan publik. Kriteria pemilihan datanya mencakup narasi yang menonjolkan rekam jejak pelestarian lingkungan, prestasi organisasi di forum internasional, atau penonjolan kepakaran intelektual jemaahnya guna membangun citra positif. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana organisasi ingin dipersepsikan oleh publik luas; apakah sebagai mitra strategis negara yang kapabel dalam pembangunan atau sebagai penjaga moral umat yang tetap memegang teguh etika lingkungan.

Rasionalitas pada level ini adalah untuk mengungkap strategi “*branding moral*” dan manajemen reputasi organisasi keagamaan di tengah isu pertambangan

yang sering kali dipandang merusak citra kesucian institusi. Peneliti mencari unit bahasa yang memperlihatkan upaya pembuktian diri organisasi bahwa keterlibatan mereka dalam sektor ekstraktif tidak akan mencederai integritas lembaga. Melalui koding legitimasi institusi ini, peneliti dapat memetakan cara portal media digunakan sebagai perisai diskursif untuk memperkuat posisi tawar organisasi di hadapan jemaah dan masyarakat luas yang sedang meragukan komitmen lingkungan ormas tersebut.

4.1.2.3.3. Relasi Kuasa Negara

Batasan pemilihan unit analisis pada bagian relasi kuasa negara ditekankan pada teks yang merefleksikan posisi tawar dan pola interaksi organisasi terhadap otoritas pemerintah. Node ini sangat krusial untuk melihat apakah portal berfungsi sebagai instrumen hegemoni pemerintah (kepanjangan tangan narasi kebijakan) atau justru sebagai ruang kontra-hegemoni yang kritis terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh negara. Peneliti mengkodekan teks yang menunjukkan sikap akomodatif, dukungan penuh terhadap program pemerintah, maupun tuntutan kritis ormas kepada otoritas negara terkait regulasi pertambangan nasional.

Analisis ini bertujuan mengungkap bagaimana relasi kuasa asimetris antara negara sebagai pemberi konsesi dan ormas sebagai penerima konsesi bekerja di dalam wacana publik. Peneliti membatasi pemilihan kutipan pada bagian teks yang memperlihatkan sinkronisasi narasi antara portal resmi ormas dan narasi birokrasi pemerintah pusat terkait manfaat hilirisasi dan tambang. Melalui pemetaan relasi kuasa ini, skema koding diharapkan dapat mengungkap sejauh mana portal resmi

organisasi Islam menjadi alat legitimasi bagi kebijakan ekstraktif negara (sebagai bentuk *manufacturing consent*) atau justru menjadi benteng terakhir yang menjaga kedaulatan warga atas kekayaan alam nasional dari intervensi pasar yang eksploitatif.

4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian ini menyajikan profil komprehensif dari dua entitas media digital yang menjadi representasi resmi organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu portal *Nu.or.id* (Nahdlatul Ulama Online) dan *Muhammadiyah.or.id*. Dalam konstelasi sosiopolitik Indonesia, kedua portal ini tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia informasi teknis atau portal berita biasa, melainkan bertindak sebagai instrumen komunikasi strategis dan saluran ideologis (*ideological apparatus*) yang sangat krusial dalam membentuk opini publik. Melalui konten harian yang diproduksi, kedua portal ini mengomunikasikan sikap resmi organisasi terhadap berbagai isu nasional, khususnya isu ekstraktivisme yang menjadi titik singgung antara kepentingan ekonomi, otoritas keagamaan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Eksistensi kedua portal ini dalam perspektif Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) merupakan manifestasi dari “Dakwah Siber” yang berupaya merespons arus globalisasi dan digitalisasi informasi. Sebagai representasi dari dua kutub besar pemikiran Islam di Indonesia tradisionalisme dan modernisme analisis terhadap profil organisasi di balik media ini menjadi prasyarat mutlak untuk memahami mengapa sebuah narasi diproduksi dengan cara tertentu. Sebagaimana dijelaskan

oleh Van Dijk, wacana selalu tertanam dalam struktur sosial,¹⁰⁶ dan dalam hal ini, *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* adalah representasi dari kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap kebijakan negara.¹⁰⁷

4.2.1. Profil Portal Resmi *Nu.or.id*



Gambar 1. 6 Logo Portal Resmi *Nu.or.id*

Portal *Nu.or.id*, yang populer dengan *branding NU Online*, merupakan platform media komunikasi resmi di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Secara administratif, Redaksi *NU Online* berpusat di Gedung PBNU Lantai 5, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat. Sebagai media dari organisasi dengan basis massa tradisional terbesar di dunia, *NU Online* telah bertransformasi dari sekadar situs berita menjadi ekosistem digital rujukan utama bagi jemaah Nahdliyin dan publik global dalam mencari informasi keislaman yang moderat.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Dijk, *The Handbook of Discourse Analysis, Second Edition*.

¹⁰⁷ Hartono, 'Aplikasi NVivo Untuk Analisis Data Kualitatif (Terbukti Artikel Tembus Scopus).'

¹⁰⁸ Nahdlatul Ulama, *Visi Dan Misi*, n.d., <https://www.Nu.or.id/page/visi-misi>.

Keberadaan *NU Online* merupakan bagian dari strategi dakwah digital PBNU untuk menjangkau jemaah di tengah arus modernitas tanpa kehilangan akar tradisinya. Menurut Ulinnuha (2010), pengembangan website ini sejak awal tahun 2000-an bertujuan untuk mengomunikasikan nilai-nilai organisasi secara lebih luas, cepat, dan masif. Pentingnya posisi *NU Online* juga ditegaskan melalui pengakuan formal oleh negara; portal ini telah terverifikasi secara administratif dan faktual oleh Dewan Pers dengan Sertifikat Nomor 1079/DP-Verifikasi/K/III/2023.¹⁰⁹ Verifikasi ini menjamin bahwa setiap produk informasi yang diterbitkan, termasuk narasi terkait tambang, mengikuti standar kode etik jurnalistik dan memiliki akuntabilitas hukum.

Visi, Misi, dan Fondasi Nilai Organisasi *NU Online* digerakkan oleh visi besar untuk menjadi penyedia informasi ke-NU-an dan keislaman yang menyejukkan serta terpercaya. Visi “menyejukkan” ini bukan sekadar jargon, melainkan pengejawantahan dari nilai *Tasamuh* (toleransi) dan *Tawassuth* (moderat). Guna mengimplementasikan visi tersebut, portal ini menjalankan misi untuk menghasilkan produk informasi berkualitas tinggi yang mendorong sikap keagamaan berkeadilan. Operasional redaksi *NU Online* berlandaskan pada empat pilar nilai utama.¹¹⁰

4.2.1.1 Profesionalitas: Menjaga standar kualitas rujukan informasi bagi publik.

Dalam isu ekstraktivisme, nilai ini menuntut penyajian data regulasi yang akurat guna mendukung posisi organisasi.

¹⁰⁹ Nahdlatul Ulama, *Kontak Kami Dan Verifikasi Dewan Pers*, 2024, <https://www.nu.or.id/page/kontak-kami>.

¹¹⁰ Nahdlatul Ulama, *Kontak Kami Dan Verifikasi Dewan Pers*.

- 4.2.1.2 Kerelawanan: Membuka ruang bagi masyarakat luas untuk berkontribusi, yang memungkinkan keragaman perspektif dari daerah-daerah yang terdampak industri tambang.
- 4.2.1.3 Kebersamaan: Menjaga nilai komunalitas Nahdliyin dalam memproduksi dan menyebarkan informasi agar tetap selaras dengan komando organisasi.
- 4.2.1.4 Pembelajaran: Mendorong pengembangan diri bagi staf redaksi agar terus relevan dengan perkembangan teknologi media.

Nilai-nilai ini dibungkus dalam semangat *khidmah* (pengabdian) untuk umat dan bangsa. Hal ini berimplikasi pada cara portal ini membingkai isu tambang; jika kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk *khidmah* ekonomi untuk kemandirian ormas, maka portal akan memproduksinya sebagai sebuah “masalah” yang harus didukung bersama.

Struktur Redaksi dan Tata Kelola Bisnis Struktur redaksi *NU Online* mencerminkan hierarki kepemimpinan PBNU yang kuat. Dewan Penasihat portal ini diisi oleh tokoh-tokoh kunci seperti KH. Miftachul Akhyar (Rais Aam) dan KH. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU), serta Alissa Qotrunnada Wahid yang mewakili perspektif kemanusiaan dan sosial. Kepemimpinan operasional berada di bawah kendali Ishaq Zubaedi Ra (Pemimpin Umum) dan Mohamad Syafi' Alielha atau Savic Ali (Pemimpin Redaksi).¹¹¹ Secara bisnis, portal ini didukung oleh PT Visi Berkah Bangsa yang mengelola sisi komersial dan kemandirian finansial media.

¹¹¹ Nahdlatul Ulama, *Redaksi NU Online*, 2024, <https://www.Nu.or.id/page/redaksi>.

4.2.2. Profil Portal Resmi *Muhammadiyah.or.id*



Gambar 1. 7 Logo Portal Resmi Muhammadiyah.or.id

Portal *Muhammadiyah.or.id* adalah media digital resmi milik Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang dikenal dengan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Berpusat di Jalan Cik Ditiro No. 23, Yogyakarta, portal ini berfungsi sebagai representasi dari visi Muhammadiyah dalam memajukan peradaban umat melalui literasi dan amal nyata. Dengan basis anggota yang diprediksi mencapai 30 hingga 40 juta jiwa, portal ini menjadi pusat rujukan informasi bagi anggota persyarikatan maupun publik internasional melalui jaringan Cabang Istimewa di luar negeri.¹¹²

¹¹² Muhammadiyah, *Redaksi Dan Profil Persyarikatan*, 2024, <https://www.google.com/search?q=https://www.muhammadiyah.or.id/page/redaksi>.

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kemandirian, Muhammadiyah telah sukses mengelola ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang pendidikan dan kesehatan. Portal *Muhammadiyah.or.id* berperan penting dalam mengomunikasikan keberhasilan aksi nyata tersebut. Berbeda dengan portal pembandingan, *Muhammadiyah.or.id* sering kali memposisikan teksnya sebagai hasil kajian kolektif yang rasional, mencerminkan identitasnya sebagai organisasi yang menghargai prosedur administratif dan disiplin ilmu pengetahuan.¹¹³

Ideologi Islam Berkemajuan sebagai Poros Wacana Landasan filosofis dari setiap konten yang diproduksi oleh *Muhammadiyah.or.id* adalah Risalah Islam Berkemajuan. Menurut Syafi'i (2023), ideologi ini menekankan bahwa gerakan Islam Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada aspek ritual-akidah, melainkan harus melakukan pembaruan dalam *mu'amalah duniawiyah* yang berdampak luas bagi kemanusiaan. Risalah ini bersumber dari inspirasi Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 dan 110, serta Al-Baqarah ayat 143, yang memerintahkan umat Islam untuk menjadi "Umat Terbaik" (*khoiru ummah*) yang menempati posisi moderat (*wasathiyah*).

Watak *wasathiyah* yang mencerahkan ini menuntun Muhammadiyah untuk mengambil peran aktif dalam memajukan umat di segala bidang, termasuk pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari mandat kekhilafahan di bumi. Dalam perspektif Islam Berkemajuan, moderasi beragama harus melahirkan aksi yang transformatif. Hal inilah yang mendasari mengapa portal Muhammadiyah

¹¹³ Syafi'i, A. R., *Moderasi Beragama Muhammadiyah Dalam Risalah Islam Berkemajuan: Perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim*, 2023.

sering kali lebih menonjolkan inovasi teknologi hijau (seperti AC ramah lingkungan atau becak listrik) dan program kemanusiaan lingkungan, daripada terjebak dalam narasi pembelaan industri ekstraktif. Sikap hati-hati atau "seksama" dalam wacana pertambangan merupakan manifestasi dari ideologi yang mengutamakan kajian risiko sebelum kemanfaatan materiil.

Struktur Redaksi dan Jangkauan Komunikasi Global Portal ini dikelola oleh tim profesional di bawah koordinasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Redaksi dipimpin oleh Muhammad Abdul Qadar (Kepala Bagian Media) dan Aan Ardianto (Koordinator Keredaksian).¹¹⁴ Struktur redaksinya sangat komprehensif, melibatkan jurnalis lapangan, fotografer, videografer, hingga analis data (*data analyst*) untuk memastikan informasi disajikan secara modern dan berbasis bukti. Keunggulan strategis portal ini adalah ketersediaan layanan multibahasa (Inggris dan Arab) yang dikelola oleh penerjemah khusus. Layanan ini bertujuan menyebarkan pesan Islam Berkemajuan ke kancah internasional guna menciptakan perdamaian global dan keadilan sosial. Struktur yang fungsional dan berorientasi pada data ini memungkinkan Muhammadiyah untuk mengemas isu lingkungan dan ekonomi ekstraktif melalui bahasa yang lebih universal, saintifik, dan berorientasi pada keberlanjutan masa depan.

4.2.3 Pemilihan Sampel Wacana

Proses pemilihan sampel wacana dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan teknik ini didasarkan pada karakteristik

¹¹⁴ Muhammadiyah, *Redaksi Dan Profil Persyarikatan*.

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna mendalam dari sebuah fenomena sosial, sehingga pemilihan sampel yang tepat menjadi krusial untuk memperoleh informasi yang kaya dan relevan.¹¹⁵ Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel tidak didasarkan pada prinsip keterwakilan statistik, melainkan pada kedalaman informasi yang dimiliki oleh informan atau dokumen yang dijadikan sumber data.¹¹⁶

Secara operasional, *purposive sampling* didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.¹¹⁷ Peneliti menetapkan kriteria inklusi yang ketat untuk memastikan bahwa artikel wacana yang dipilih memiliki signifikansi terhadap isu ekstraktivisme dan kebijakan Wilayah Izin Usaha Perambangan Khusus (WIUPK) bagi ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam PP No.25 tahun 2024. Penentuan kriteria ini sangat penting dalam desain penelitian kualitatif karena peneliti harus memilih sumber data yang paling mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

Kriteria utama dalam penentuan sampel wacana ini adalah sebagai berikut; Pertama, relevansi teks, seperti: Teks berita, harus secara eksplisit memuat kata kunci seperti “tambang”, “WIUPK”, “Lingkungan”, atau respons resmi NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan ekstraktif. Kedua, otoritas sumber: Data bersumber dari portal resmi organisasi, yakni *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*,

¹¹⁵ Andriani, D et al., *Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review.*, 6(4) (2025).

¹¹⁶ Asrulla et al., *Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis*, 7(3), 26320-26332. (2023).

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013).

yang bertindak sebagai kanal informasi utama dan representasi ideologis resmi. Ketiga, Rentang Waktu: Teks yang dipublikasikan dalam “periode emas” diskursus, yakni antara 1 Juni 2024 hingga 30 Juni 2025, di mana ketegangan antara nilai *Green Islam* dan pragmatisme ekonomi sedang berada pada puncaknya.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan 49 unit analisis, yang terdiri dari, 27 teks berita pada portal *Nu.or.id* dan 22 teks berita dari Portal *Muhammadiyah.or.id*. Yang dianggap sebagai landasan cara pandang yang paling kaya akan informasi. Penggunaan jumlah sampel yang relatif terbatas namun mendalam ini sejalan dengan prinsip sampling kualitatif yang lebih mengutamakan kualitas data dan pemenuhan informasi hingga mencapai titik jenuh, daripada kuantitas sampel.¹¹⁸ Melalui sampel terpilih inilah, peneliti dapat melakukan dekonstruksi terhadap kognisi sosial dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik teks portal ormas Islam.

4.2.3.1. Sampel Wacana Portal Resmi *Nu.or.id*

Penetapan portal resmi *Nu.or.id* sebagai unit analisis pertama didasarkan pada posisinya sebagai kanal informasi utama sekaligus representasi ideologis NU. Berdasarkan hasil kurasi data menggunakan NVivo 15, peneliti menemukan volume teks berita yang cukup besar, yakni sebanyak 27 unit analisis. Banyaknya jumlah teks berita yang dibahas pada portal ini menunjukkan bahwa NU menganggap isu ekstraktivisme dan pemberian izin tambang (WIUPK) sebagai

¹¹⁸ Asrulla et al., *Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis*.

agenda yang sangat penting dan perlu untuk segera dikonstruksikan maknanya secara proaktif bagi jemaah Nahdliyin. Hal ini mencerminkan upaya organisasi untuk melakukan penetapan agenda (*agenda setting*) yang masif guna memberikan legitimasi teologis atas kebijakan ekonomi yang diambil.

Pemilihan 27 teks ebrita ini dilakukan secara selektif melalui teknik *purposive sampling* untuk memperoleh kedalaman informasi (*information-rich cases*).¹¹⁹ Setiap teks dipilih karena memuat informasi yang mampu menjawab dialektika wacana organisasi, mulai dari fase legitimasi awal hingga rekonstruksi teologis pasca-kontroversi.¹²⁰ Dengan volume teks berita yang dominan, NU secara sadar menggunakan mediana sebagai instrumen komunikasi massa untuk memastikan bahwa narasi “kemaslahatan” tersampaikan secara berulang dan sistematis guna menjaga kohesi di tingkat akar rumput. Adapun teks pemberitaan pada portal *Nu.or.id* seperti di bawah ini:

Tabel 1. Sampel Wacana Portal Resmi Nu.or.id

Kode	Judul Berita	Tanggal Terbit
NU-01	Ketum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan	3/6/2024
NU-02	PBNU Tak Mau Disodori Konsesi Tambang yang Berpotensi Rugikan Warga	6/6/2024

¹¹⁹ Andriani, D et al., *Pemilihan Teknik Sampling Yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review*.

¹²⁰ Asrulla et al., *Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis*.

NU-03	PBNU Terima Aspirasi PCINU Sedunia soal Konsesi Tambang	21/6/2024
NU-04	Ketua PBNU: Kritik soal Konsesi Tambang adalah Sesuatu yang Baik	27/6/2024
NU-05	Kiai Said Agil Tegaskan Redistribusi Tambang Harus Dilakukan Secara Adil	3/6/2024
NU-06	Gus Ulil Jelaskan Dua Pengelompokan Isu Lingkungan	31/7/2024
NU-07	Banjir Sukabumi: 2.500 KK Direlokasi... Kerusakan Lingkungan Diduga Akibat Tambang	16/12/2024
NU-08	Aktivitas Tambang di Sukabumi Diduga jadi Biang Kerok Bencana	17/12/2024
NU-09	Usulan Perguruan Tinggi Kelola Tambang: Upaya Bungkam Sikap Kritis?	28/1/2025
NU-10	Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama, Jiwa, Akal, dan Harta	31/1/2025
NU-11	RUU Minerba Disahkan, Kampus Batal Dapat Tambang, Ormas Diberi Kebebasan	18/2/2025
NU-12	Dampak Tambang Emas Tanpa Izin di Bungo: Narkoba Marak, Lingkungan Rusak	20/5/2025
NU-13	Soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ketua PBNU: Eksploitasi SDA Hanya Memperkaya Segelintir	10/6/2025
NU-14	Ketum PBNU Buka Suara Soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Gus Fahrur	12/6/2025

NU-15	Yenny Wahid: Saya Orang NU Dukung Pelestarian Raja Ampat	12/6/2025
NU-16	Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan: Masyarakatnya Terbelah	12/6/2025
NU-17	PBNU Buka Suara Atas Tudingan Terima Aliran Dana Dari Perusahaan Tambang	13/6/2025
NU-18	Ekologi vs Ekstraksi: Beberapa Putusan Munas NU untuk Lindungi Alam	18/6/2025
NU-19	Belajar dari Negeri Jiran: Bagaimana Malaysia Mulai Tinggalkan Tambang?	18/6/2025
NU-20	Tradisi Sasi: Penghormatan kepada Alam di Raja Ampat Tetap Berjalan	19/6/2025
NU-21	Tambang Nikel di Pulau Gag Rugikan Nelayan, Ikan Menjauh	19/6/2025
NU-22	Dampak Tambang Nikel: Tumbuhan dan Hewan Endemik Terancam Punah	19/6/2025
NU-23	Akademisi Nilai Industri Ekstraktif Belum Beri Kesejahteraan	19/6/2025
NU-24	Ekoteologi: Jalan Iman untuk Kepedulian Lingkungan	20/6/2025
NU-25	Alissa Wahid Tegaskan Harus Pertimbangkan Aspek Lingkungan & Sosial	24/6/2025
NU-26	Ketua PBNU Ajak Jaga Lingkungan Melalui Pendekatan Ekologi Spiritual	24/6/2025

NU-27	PBNU dan Tambang: Dinamika Sikap NU dalam Satu Dekade	24/6/2025
-------	---	-----------

4.2.3.2. Sampel Wacana Portal Resmi *Muhammadiyah.or.id*

Berbeda dengan temuan pada portal NU, peneliti menemukan bahwa jumlah Teks Berita yang membahas isu pertambangan pada portal *Muhammadiyah.or.id* cenderung lebih sedikit, yakni sebanyak 22 unit analisis. Perbedaan kuantitas ini mengindikasikan penggunaan teknik *discourse of silence* (wacana keheningan) oleh Muhammadiyah. Dalam perspektif pragmatik, keheningan bukanlah sekadar absennya suara, melainkan sebuah alat komunikasi aktif atau *alternative device* yang digunakan secara sengaja oleh komunikator untuk memberikan makna tertentu tanpa harus mengutarakannya secara eksplisit.¹²¹

Melalui teknik ini, Muhammadiyah tampak secara sengaja meminimalisir intensitas pembahasan guna menghindari eskalasi wacana yang dianggap kurang produktif bagi citra organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Dauenhauer¹²² bahwa setiap diskursus selalu berkelindan dengan fenomena keheningan, dimana keheningan berfungsi untuk membatasi (*restraining*) atau memberikan tempat bagi narasi baru agar narasi lama yang dianggap berisiko dapat diredam. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menggunakan keheningan sebagai strategi untuk menjauhkan diri dari kontroversi tambang yang sedang memanas di ruang publik.

¹²¹ Lynn Thiesmeyer, *Discourse and Silencing : Representation and the Language of Displacement* (John Benjamins B.V., 2003).

¹²² Bernard P. Dauenhauer, *Discourse, Silent, and Tradition*, Vol. 32, No. 3 (Mar., 1979), pp. 437–451 (1979).

Lebih lanjut, Thiesmeyer, menjelaskan bahwa *silencing* atau pembungkaman wacana tertentu seringkali bersifat politis dan bertujuan untuk mengontrol representasi sosial.¹²³ Dengan tidak menjadikan isu tambang sebagai topik utama, Muhammadiyah secara tidak langsung melakukan “penyaringan diskursif” untuk lebih menonjolkan narasi solusi teknologi berkelanjutan daripada terjebak dalam pusaran legitimasi tambang yang kontroversial. Minimnya jumlah teks ini justru menjadi data penting yang menunjukkan adanya prioritas diskursif yang berbeda. Melalui 22 Teks Berita ini, peneliti dapat melihat bagaimana Muhammadiyah mengelola komunikasinya secara selektif dan berhati-hati guna menjaga independensi dan kewibawaan moral organisasi di hadapan publik.

Tabel 2. Sampel Wacana Portal Resmi Muhammadiyah.or.id

Kode	Judul Berita	Tanggal Terbit
MD-01	Nasyiatul Aisyiyah Gelorakan Toleransi Lewat Pendekatan Lingkungan	1/11/2024
MD-02	Tantangan Dakwah Sekarang adalah Masalah Lingkungan	4/6/2024
MD-03	PP Muhammadiyah Tanggapi Soal Tambang untuk Ormas Keagamaan	6/6/2024
MD-04	Aktivis Lingkungan Muhammadiyah Raih Penghargaan Kalpataru	21/8/2024

¹²³ Lynn Thiesmeyer, *Discourse and Silencing : Representation and the Language of Displacement*.

MD-05	Perwakilan Lintas Iman Berbicara Isu Lingkungan Berbasis Ajaran	21/9/2024
MD-06	Muhammadiyah Ciptakan Kader Peduli Lingkungan yang Kompeten	12/10/2024
MD-07	Pemimpin Agama Penting Berperan dalam Menyelamatkan Lingkungan	23/10/2024
MD-08	Muhammadiyah Luncurkan Pendingin Udara Hemat Energi (ACMU)	6/12/2024
MD-09	Di Bulan Ramadan, Mari Tingkatkan Kepedulian terhadap Lingkungan	4/2/2025
MD-10	Muhammadiyah Gandeng Pemuda Lintas Iman Lestarkan Lingkungan	17/2/2025
MD-11	Generasi Muda Kunci Gerakan Keadilan Lingkungan	14/3/2025
MD-12	Muhammadiyah Luncurkan Lima Program untuk Lingkungan	15/3/2025
MD-13	Muhammadiyah Luncurkan Becak Listrik (Betrik 1912)	22/3/2025
MD-14	Eco Bhinneka & GreenFaith Diseminasi Hasil Advokasi Risiko Lingkungan	24/3/2025
MD-15	Muhammadiyah Siap Kelola Tambang dengan Pertimbangan Seksama	28/6/2025
MD-16	Aisyiyah Luncurkan Buku Islamic Green School	8/1/2025
MD-17	Kolaborasi Lintas Iman Kelola Risiko Lingkungan	19/2/025

MD-18	Ajaran Islam Mengarahkan pada Pelestarian Air dan Lingkungan	17/4/2025
MD-19	Pelaksanaan Haji Harus Memperhatikan Aspek Lingkungan	14/5/2025
MD-20	Dahlan Rais: Hidup di Lingkungan itu Menjaga dan Merawat	28/5/2025
MD-21	Pemimpin Agama Ambil Peran Selamatkan Lingkungan	23/10/2024
MD-22	Unisa Yogyakarta Tunjukkan Kepedulian Terhadap Lingkungan	25/11/2024

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Dimensi Teks (Level Mikro)

Analisis pada level mikro merupakan tahapan krusial dalam Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk, karena pada dimensi inilah manifestasi bahasa secara eksplisit dapat diamati. Analisis mikrostruktur berasumsi bahwa teks bukan sekadar susunan kata yang netral, melainkan produk dari representasi ideologis komunikator yang dipengaruhi oleh ideologi organisasi. Dalam konteks isu ekstraktivisme pasca terbitnya PP No. 25 Tahun 2024, bahasa digunakan sebagai instrumen untuk membangun realitas sosial, melakukan normalisasi atas kebijakan tertentu, atau justru membangun resistensi etis.

Peneliti membedah secara komparatif bagaimana portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* menggunakan elemen-elemen kebahasaan leksikon, sintaksis, dan retorika untuk mengonstruksi posisi organisasi mereka. Fokus utama

dalam analisis ini adalah melihat bagaimana NU cenderung melakukan sakralisasi terhadap industri ekstraktif sebagai bagian dari kemandirian umat, sementara Muhammadiyah melakukan distansi etis dengan menonjolkan risiko lingkungan dan kehati-hatian prosedural.

4.3.1.1. Pilihan Leksikon (Diksi)

Pemilihan leksikon merupakan strategi fundamental dalam pembentukan wacana yang berfungsi untuk mengarahkan opini publik melalui pelabelan tertentu. Diksi yang dipilih mencerminkan skema kognitif yang dimiliki oleh komunikator organisasi. Berdasarkan data koding NVivo, ditemukan kontras yang tajam antara kosakata yang digunakan oleh kedua portal dalam membingkai kehadiran ormas di sektor pertambangan.

4.3.1.1.1 Konstruksi Leksikon *Nu.or.id*

Pada portal *Nu.or.id*, leksikon yang muncul didominasi oleh kosakata yang bersifat justifikatif-ekonomis. Penggunaan diksi “Maslahah” dan “Kemaslahatan Rakyat” berfungsi untuk melakukan transformasi makna dari industri ekstraktif yang identik dengan kerusakan alam menjadi aktivitas yang bernilai ibadah dan kemanfaatan sosial. Leksikon “*Affirmative Policy*” digunakan sebagai perangkat ideologis untuk menjustifikasi bahwa pemberian izin tambang bukan sekadar urusan bisnis, melainkan bentuk keadilan sejarah bagi kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Selain itu, munculnya kosakata teknokratis seperti “*Revenue*”,

“Transparan”, dan “Profesionalitas” bertujuan untuk membangun citra NU sebagai organisasi yang modern dan kapabel secara manajerial. Hal ini penting untuk meredam keraguan publik mengenai kemampuan organisasi keagamaan dalam mengelola industri yang sangat teknis. Implikasinya, wacana NU mencoba mengalihkan perhatian publik dari risiko ekologis menuju prospek kemandirian finansial institusi.

Tabel 3. Analisis Leksikon Pada Portal Nu.or.id

Leksikon	Konteks Penggunaan	Fungsi Diskursif
“Maslahah”	Digunakan sebagai landasan utama penerimaan konsesi tambang.	Memberikan legitimasi teologis dan label “suci” pada aktivitas ekstraksi.
“ <i>Affirmative Policy</i> ”	Merujuk pada pemberian izin khusus dari pemerintah kepada ormas.	Menjustifikasi izin tambang sebagai hak sosial dan alat pemerataan ekonomi.
“ <i>Revenue</i> “ / “Pendapatan”	Fokus pada keberlangsungan finansial untuk membiayai organisasi.	Menggeser narasi krisis lingkungan ke arah kebutuhan vitalitas organisasi.
“Kemandirian”	Dikaitkan dengan visi NU untuk tidak bergantung pada donasi.	Membangun kebanggaan kolektif warga NU atas kemandirian ekonomi.

“Terobosan”	Menyebut langkah pemerintah sebagai kebijakan yang berani.	Mencitrakan kebijakan tambang sebagai solusi inovatif bagi kesejahteraan.
-------------	--	---

Penggunaan diksi “*Maslahah*” merupakan instrumen retorik paling kuat dalam teks *Nu.or.id*. Kata ini digunakan untuk membungkus motif ekonomi dalam jubah keagamaan yang sakral. Sebagaimana pada kutipan berikut:

“Sebagian menyayangkan sikap PBNU yang bersedia mengelola tambang karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga lingkungan dan berpotensi merugikan masyarakat. Namun, ada pula yang mendukung penuh dengan harapan kemaslahatan.” (NU-27)

“Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung” (NU-01)

Secara kritis, penggunaan kata “kemaslahatan” berfungsi sebagai *strategi sacralization* (penyucian wacana). Berdasarkan KBBI, masalah didefinisikan sebagai kegunaan atau kebaikan yang membawa manfaat.¹²⁴ Dalam konteks ini, *Nu.or.id* menggunakan leksikon ini untuk melakukan pengalihan fokus (*shifting focus*) dari risiko kerusakan ekologis menuju janji manfaat sosial. Penerapan

¹²⁴ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, n.d., <https://kbbi.web.id/>.

konsep ini selaras dengan teori Authorization dari Van Leeuwen, dimana legitimasi dibangun melalui referensi terhadap tradisi, adat istiadat, dan hukum agama yang dianggap tidak terbantahkan.¹²⁵ Dalam konteks ini, menolak tambang ormas dikonstruksi sedemikian rupa sehingga seolah-olah berimplikasi pada menolak sebuah “kebaikan” (masalah) yang dianjurkan oleh agama. Secara kritis, hal ini merupakan bentuk *Strategic Ambiguity* oleh Eisenberg, dimana istilah keagamaan yang bersifat umum digunakan untuk membungkus kepentingan ekonomi yang spesifik guna meminimalisir disonansi kognitif di kalangan jemaah.¹²⁶

Selain itu, untuk menanggapi keraguan publik mengenai izin khusus dari pemerintah, *Nu.or.id* menggunakan leksikon teknokratis-politis seperti “*Affirmative Policy*” (Kebijakan Afirmatif).

“Gus Ulil juga menambahkan alasan pemberian tambang itu lahir dari beberapa dasar pemikiran, salah satunya adalah affirmative policy” (NU-04)

“Izin pengelolaan tambang terobosan yang baik, cukup berani dan isnyaallah membawa kemaslahatan yang cukup besar” (NU-04)

Penggunaan istilah asing ini bertujuan untuk memberikan kesan intelektualitas dan legalitas yang mapan. Dalam kajian kebijakan publik, *Affirmative policy* atau kebijakan afirmatif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang secara historis

¹²⁵ Theo van Leeuwen, *Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis*, 10 April 2008, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195323306.001.0001>.

¹²⁶ Eisenberg, E. M., *Ambiguity as Strategy in Organizational Communication.*, 51(3), 227–242 (1984).

dirugikan. Secara kritis, penggunaan leksikon ini mencoba membangun narasi “Keadilan Sejarah”. Portal ini dinilai ingin meyakinkan pembaca bahwa pemberian izin tambang bukanlah bentuk nepotisme politik, melainkan upaya negara untuk “menebus dosa masa lalu” dengan memberikan aset strategis kepada ormas yang selama ini dianggap hanya menjadi penonton dalam ekonomi nasional. Kata “terobosan” (KBBI: penemuan baru; langkah penting) memperkuat kesan bahwa kebijakan ini adalah solusi inovatif, bukan sekadar kompromi kekuasaan.¹²⁷

Sedangkan, munculnya kosakata ekonomi murni menunjukkan adanya pergeseran paradigma organisasi menuju pragmatisme finansial. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut:

*“Konsekuensi yang harus diambil oleh PBNU adalah membangun kapasitas secara besar-besaran untuk mendapatkan **revenue**” (NU-03)*

*“Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2010-2021 itu juga berharap, izin usaha pertambangan dapat melahirkan peluang **kemandirian** ormas” (NU-05)*

Berdasarkan KBBI, kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.¹²⁸ Penggunaan leksikon ini sangat strategis karena menyentuh sentimen kebanggaan kolektif organisasi. Secara kritis, narasi “kemandirian” digunakan untuk mematikan kritik mengenai risiko lingkungan. Implikasinya, jika organisasi tidak mengambil tambang, maka organisasi akan terus

¹²⁷ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹²⁸ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

bergantung pada pihak luar, yang dalam skema kognitif NU dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dakwah. Dengan demikian, risiko ekologis Pulau Gag atau Raja Ampat “dikorbankan” atau setidaknya dikesampingkan demi pencapaian idealisme kemandirian institusi.

Untuk meredam kekhawatiran publik mengenai ketidakmampuan ormas mengelola tambang yang sangat teknis, penulis menggunakan leksikon yang mencitrakan modernitas.

*“Kiai Said menegaskan bahwa redistribusi dan relokasi tambang harus dilakukan secara adil dan **transparan**” (NU-05)*

*“Gus Yahya menjamin bahwa pengelolaannya dilakukan secara **transparan dan profesional**” (NU-01)*

Diksi “transparan” (KBBI: nyata; jelas; tidak ada yang disembunyikan) dan “profesionalitas” bertujuan untuk membangun *trust* (kepercayaan) publik.¹²⁹ Analisis kritis menunjukkan bahwa leksikon teknokratis ini berfungsi sebagai perangkat defensif. *Nu.or.id* mencoba “menyamarkan” wajah ormas yang tradisional dengan wajah korporasi yang modern. Hal ini krusial untuk menangkis stigma bahwa ormas keagamaan hanya akan menjadi “pemburu rente” yang tidak kompeten. Strategi ini menciptakan kesan bahwa keterlibatan NU dalam pertambangan didasari oleh sistem yang terukur, bukan sekadar keinginan emosional.

¹²⁹ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

4.3.1.1.2. Konstruksi Leksikon *Muhammadiyah.or.id*

Sebaliknya, *Muhammadiyah.or.id* menggunakan leksikon yang bersifat etik-prosedural dan *eco-centric*. Diksi yang paling menonjol adalah “Seksama”. Diksi ini membangun citra Muhammadiyah sebagai organisasi yang rasional, tidak emosional, dan berbasis ilmu pengetahuan (*science-based*). Muhammadiyah juga menyuntikkan diksi teologis “Khalifah” dan “Amanah” yang dikaitkan dengan pelestarian alam sebagai tanggung jawab moral kepada Tuhan.

Penggunaan kata “*Mafsadat*” (kerusakan) secara berulang merupakan strategi diskursif untuk membangun kewaspadaan. Berbeda dengan NU yang menggunakan eufemisme, Muhammadiyah tetap menggunakan istilah “Industri Ekstraktif” untuk menunjukkan pengakuan terhadap risiko inheren dari aktivitas tersebut. Diksi “Penjaga Moral” mempertegas bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam diskursus ini bukan untuk menjadi eksekutor bisnis, melainkan sebagai penyeimbang moral agar kebijakan negara tidak melampaui batas ekologis.

Tabel 4. Analisis Leksikon Pada Portal *Muhammadiyah.or.id*

Leksikon Kunci	Konteks Penggunaan	Fungsi Diskursif
“Seksama”	Menjelaskan proses pengambilan keputusan organisasi yang hati-hati.	Membangun citra rasionalitas, ketelitian, dan sikap tidak oportunistik.
“ <i>Mafsadat</i> ”	Merujuk pada potensi kerusakan lingkungan	Memberi peringatan teologis dan alarm etis

	dan sosial akibat tambang.	atas bahaya ekstraktivisme.
<i>“Industri Ekstraktif”</i>	Digunakan secara konsisten tanpa eufemisme.	Menjaga jarak objektif dan mengakui sifat industri yang eksploitatif.
<i>“Penjaga Moral”</i>	Peran ormas dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan negara.	Menempatkan agama sebagai instrumen kontrol atas keserakahan ekonomi.
<i>“Khalifah”</i>	Merujuk pada mandat manusia sebagai pemimpin bumi (Q.S. Al-Baqoroh:30)	Memberikan legitimasi teologis absolut yang melampaui debat saintifik murni. Mengonstruksi isu lingkungan sebagai ujian iman dan ketaatan terhadap perintah Tuhan.
<i>“Ujung Tombak”</i>	Digunakan untuk mendefinisikan peran strategis kader	Menggunakan metafora militer untuk meningkatkan disiplin dan agensi perempuan. Melakukan domestikasi

	perempuan (Aisyiyah) di akar rumput.	isu makro ke ruang keluarga melalui narasi <i>Eco-maternalism</i> .
“Inovatif”	Digunakan untuk menggambarkan teknologi atau metode pengelolaan lingkungan organisasi.	Membangun citra organisasi yang rasional, melek teknologi, dan pro-sains. Berfungsi menyeimbangkan wajah tradisional-agama dengan identitas korporasi sosial yang modern dan adaptif.

Analisis leksikon dalam portal *Muhammadiyah.or.id* menunjukkan adanya strategi pemilihan kata yang sangat terukur untuk membangun identitas organisasi yang rasional sekaligus agamis dalam merespons krisis lingkungan. Strategi pertama terlihat pada penggunaan leksikon yang membangun citra intelektualisme-rasional guna menunjukkan kendali organisasi atas informasi. Hal ini teridentifikasi dalam kalimat di bawah ini:

*"Keputusan resmi tersebut diambil oleh Muhammadiyah melalui pertimbangan yang **seksama**," (MD-15)*

*"Kalau ada penawaran resmi Pemerintah Kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan **seksama**," (MD-03)*

Sebagai bentuk justifikasi atas keterlibatan ormas dalam izin tambang. Merujuk pada KBBI, kata “seksama” (atau saksama) didefinisikan sebagai teliti, cermat, atau akurat.¹³⁰ Secara kritis, pemilihan diksi ini berfungsi sebagai strategi pertahanan (*defensive strategy*) untuk menegaskan bahwa langkah organisasi bukanlah keputusan emosional atau oportunistik, melainkan hasil proses kognitif yang saintifik-birokratis.¹³¹

Kedua, Muhammadiyah menyuntikkan leksikon teologis sebagai instrumen “Penjaga moral” untuk melakukan sakralisasi terhadap isu-isu teknis ekologis. Selain itu, dalam teksnya ditemukan narasi yang menegaskan bahwa,

*“Agama menjadi **penjaga moral** dalam melestarikan, mengelola dan memuliakan lingkungan dengan tanggung jawab, kepedulian, keadilan dan keberlanjutan nilai-nilai ini diambil dari ayat-ayat dalam kitab suci” (MD-14)*

*“manusia diciptakan di muka bumi sebagai **khalifah** atau perwakilan Allah SWT” (MD-01)*

KBBI mendefinisikan “khalifah” sebagai wakil atau pengganti (pemimpin).¹³² Namun, dalam perspektif AWK, diksi ini mengandung muatan ideologis (*ideological loading*) yang mengubah status manusia dari sekadar

¹³⁰ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹³¹ Parulian Sibuea et al., *DIKSI DAN MAKNA DALAM KOMUNIKASI: PILAR KONSEPTUAL DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT DIGITAL KONTEMPORER*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2025 (2025), <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/DJCE/issue/view/114>.

¹³² DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

“pengguna alam” menjadi “manajer ilahi”.¹³³ Redefinisi ini bertujuan untuk melakukan mobilisasi massa melalui sentimen keagamaan, dimana pengerusakan lingkungan dikonstruksi sebagai pembangkangan terhadap mandat Tuhan. Sejalan dengan itu, penggunaan istilah teknis-agama seperti dalam kutipan:

“Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya,” (MD-15)

Berfungsi sebagai alarm etis. Diksi “Mafsadat” yang dalam KBBI merujuk pada kerusakan atau kerugian,¹³⁴ dalam konteks ini berfungsi menarik isu lingkungan ke wilayah hukum Islam (Fiqh). Hal ini selaras dengan penelitian *Eco-Justice* yang menyebutkan bahwa penggunaan istilah agama dalam isu ekonomi bertujuan memberikan “legitimasi suci” untuk mengontrol keserakahan ekonomi.¹³⁵

Selain itu, Portal ini juga menggunakan leksikon yang menonjolkan modernitas dan agensi kelompok untuk membedakan diri dari ormas tradisional. Hal ini terlihat saat Muhammadiyah mempromosikan produk teknologinya dengan menyatakan:

“Muhammadiyah resmi meluncurkan produk inovatif berupa pendingin udara bernama ACMU,” (MD-08).

¹³³ Dijk, *The Handbook of Discourse Analysis, Second Edition*.

¹³⁴ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹³⁵ Obaji M. Agbiji, *Religion and Ecological Justice in Africa: Engaging ‘value for Community’ as Praxis for Ecological and Socio-Economic Justice*, 2015, <https://doi.org/10.4102/HTS.V71I2.2663>.

Berdasarkan KBBI, “inovatif” berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.¹³⁶ Analisis kritis menunjukkan bahwa leksikon ini digunakan sebagai alat branding untuk menggeser identitas Muhammadiyah menjadi aktor teknologi yang kompetitif. Hal ini juga terlihat pada pemberian label strategis bagi perempuan dalam kalimat:

“Ibu-ibu 'Aisyiyah merupakan ujung tombak dakwah lingkungan,” (MD-16).

Diksi “ujung tombak” menurut KBBI adalah kiasan bagi bagian yang paling diandalkan.¹³⁷ Secara diskursif, metafora militeristik ini memberikan beban agensi yang besar kepada perempuan, sekaligus melakukan domestikasi isu lingkungan melalui peran ibu. Menurut Agarwal dalam teorinya mengenai *Feminist Environmentalism*, penggunaan jalur gender dalam mobilisasi massa memungkinkan organisasi untuk menyentuh unit terkecil masyarakat (keluarga) dengan biaya sosial yang lebih rendah namun dengan loyalitas yang lebih tinggi.¹³⁸ Melalui manajemen leksikon ini, Muhammadiyah atau ‘Aisyiyah sukses melakukan negosiasi posisi yang kompleks: menyeimbangkan antara otoritas ketuhanan (tugas kekhalifahan), rasionalitas sains (solusi teknis lingkungan), dan pragmatisme organisasi di hadapan negara dan umat, sehingga kebijakan lingkungan organisasi tidak lagi dipandang sebagai isu politik makro, melainkan sebagai kewajiban moral yang sakral.

¹³⁶ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹³⁷ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹³⁸ Bina Agarwal, *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*, Vol. 18, No. 1, pp. 119–158 (1992), <https://www.jstor.org/stable/3178217>.

4.3.1.2. Struktur Sintaksis (Kalimat)

Level sintaksis menganalisis bagaimana kalimat disusun untuk menunjukkan posisi aktor, agensi, dan tanggung jawab. Struktur kalimat mencerminkan distribusi kekuasaan dalam teks: siapa yang diposisikan sebagai subjek aktif pengambil keputusan dan siapa yang menjadi objek pasif dari sebuah kebijakan.

4.3.1.2.1. Sintaksis *Nu.or.id*

Dalam wacana NU, struktur kalimat cenderung memposisikan organisasi (PBNU) sebagai aktor aktif yang memiliki agensi penuh dan kemandirian dalam bertindak. Kalimat aktif digunakan secara masif untuk menunjukkan kesiapan manajerial dan infrastruktur bisnis organisasi. Struktur kalimat juga sering kali menyandingkan aktor ormas dengan aktor negara dalam relasi yang harmonis, yang mencerminkan strategi komunikasi akomodatif.

Konsekuensi dari pilihan sintaksis ini adalah munculnya kesan “kemitraan strategis” dimana ormas bertindak sebagai kepanjangan tangan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan menempatkan ormas sebagai subjek aktif, NU mencoba meyakinkan publik bahwa kendali atas tambang berada di tangan institusi keagamaan yang amanah, bukan di tangan korporasi asing yang hanya mengejar profit.

Tabel 5. Analisis Sintaksis Pada Portal Nu.or.id

Strategi Sintaksis	Contoh Konstruksi Kalimat	Dampak Wacana
Agensi Institusional	<i>“Nahdlatul Ulama telah siap dengan perangkat organisasi lengkap secara profesional”</i>	Menunjukkan otoritas, kesiapan teknis, dan kemantapan organisasi.
Penerimaan Mandat	<i>“Pemerintah memberikan mandat kepada ormas keagamaan”</i>	Memposisikan ormas sebagai mitra terpercaya bagi otoritas negara.
Nominalisasi	<i>“Terjadinya kerusakan hutan mangrove dan sedimentasi yang diakibatkan ikan menjaug dikeluhkan nelayan”</i>	Kerusakan lingkungan diposisikan sebagai peristiwa alam statis tanpa pelaku jelas, secara halus melindungi citra sektor ekstraktif dengan mengalihkan fokus dari tindakan (action) ke situasi (event).
Atribusi Positif Aktor	<i>“Kebijakan ini merupakan langkah berani Presiden”</i>	Melegitimasi otoritas pemberi kebijakan melalui struktur kalimat pujian.

Justifikasi Subjek	Melalui “PBNU mengelola tambang untuk kemaslahatan rakyat”.	Mengaitkan subjek pengelola dengan tujuan sosial yang mulia.
--------------------	---	--

Dalam narasi penerimaan konsesi, *Nu.or.id* secara konsisten menggunakan kalimat aktif dengan menempatkan Nahdlatul Ulama sebagai subjek utama. Hal ini terlihat pada kutipan berikut:

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan perangkat organisasi lengkap untuk mengelola konsesi tambang secara profesional.”
(NU-01)

Secara kritis, penempatan “Nahdlatul Ulama” sebagai subjek aktif yang diikuti predikat “telah siap” berfungsi untuk membangun otoritas manajerial. Berdasarkan KBBI, kata siap berarti sudah sedia, sudah lengkap.¹³⁹ Pilihan sintaksis ini bertujuan meyakinkan publik bahwa organisasi memiliki agensi penuh (*full agency*) dan tidak hanya bertindak sebagai “pemburu rente”. Menurut Halliday, penggunaan kalimat aktif seperti ini memberikan atribusi Power kepada subjek, sehingga NU dicitrakan sebagai entitas yang mandiri dan berdaulat dalam mengambil keputusan strategis.¹⁴⁰

Pada pemilihan struktur kalimat juga sering kali menempatkan “Pemerintah” sebagai subjek aktif saat berkaitan dengan legalitas. Hal ini krusial untuk membentengi organisasi dari tuduhan nepotisme.

¹³⁹ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹⁴⁰ M.A.K. Halliday, *Halliday's Introduction to Functional Grammar*, 3rd edn (Routledge, 2004).

“Pemerintah memberikan konsensi tambang kepada ormas kegamaan.” (NU-27)

*“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh **pemerintah dimandatkan** kepada Nahdatul Ulama untuk mengelolanya”(NU-01)*

Analisis kritis menunjukkan bahwa struktur kalimat Aktif Transitif ini (Subjek: Pemerintah; Kerja: Memberikan; Objek: Mandat) digunakan untuk menegaskan bahwa sumber otoritas berasal dari negara secara formal. Sedangkan pada penggunaan kata “Mandat” (KBBI: perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak kepada seseorang untuk dilakukan) memberikan kesan kewajiban suci dan legalitas absolut.¹⁴¹ Dengan menempatkan Pemerintah sebagai agen pemberi, *Nu.or.id* membangun wacana bahwa keterlibatan ormas adalah sebuah “penugasan negara” yang terhormat, bukan sekadar permintaan ormas tersebut.

Temuan yang paling kontras muncul ketika *Nu.or.id* melaporkan dampak buruk aktivitas tambang (seperti pada kasus Pulau Gag). Di sini, *Nu.or.id* cenderung menggunakan Nominalisasi untuk mengaburkan tanggung jawab korporasi.

“Terjadinya kerusakan hutan mangrove dan sedimentasi yang akibatkan ikan menjauh dikeluhkan nelayan.” (NU-21)

Kata “Terjadinya” dan “Kerusakan” merupakan bentuk nominalisasi dari kata kerja “terjadi” dan “merusak”. Berdasarkan teori Billig, nominalisasi berfungsi

¹⁴¹ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

untuk menghilangkan aktor (*deletion of agency*).¹⁴² Secara kritis, kalimat ini tidak menyebutkan “PT Gag Nikel merusak mangrove”, melainkan menyebutkan “Terjadinya kerusakan”. Akibatnya, kerusakan lingkungan diposisikan sebagai peristiwa alam yang statis tanpa pelaku yang jelas. Strategi sintaksis ini secara halus melindungi citra sektor ekstraktif di mata pembaca dengan mengalihkan fokus dari tindakan (*action*) menuju situasi (*event*).

Terakhir, portal ini sering menggunakan struktur kalimat yang menyandingkan subjek “Presiden” atau Pemerintah dengan atribusi positif untuk menunjukkan relasi harmonis.

*“Kebijakan konsensi tambang bagi ormas keagamaan merupakan langkah **berani Presiden** Joko Widodo untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.” (NU-01)*

Pilihan struktur kalimat deskriptif ini berfungsi untuk melegitimasi pemberi kebijakan. Penggunaan kata “Berani” (KBBI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya)¹⁴³ sebagai komplemen subjek memberikan beban emosional positif kepada pembaca. Hal ini mencerminkan strategi komunikasi akomodatif media NU untuk memperkuat hubungan “Kemitraan Strategis” antara ormas dan pemerintah, sekaligus meredam kritik publik melalui pengagungan agensi pemimpin negara.

¹⁴² Michael Billig, ‘The Language of Critical Discourse Analysis: The Case of Nominalization’, *Discourse & Society* 19(6):783-800 (2008), <https://doi.org/10.1177/0957926508095894>.

¹⁴³ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

4.3.1.2.2. Sintaksis *Muhammadiyah.or.id*

Struktur kalimat di *Muhammadiyah.or.id* cenderung lebih kompleks, berhati-hati, dan bersifat kondisional. Penggunaan kalimat syarat (misalnya dengan kata “jika” atau “apabila”) menciptakan jarak antara organisasi dan kebijakan tambang. Strategi ini digunakan untuk menjaga kedaulatan organisasi agar tidak terlihat “terikat” atau “terbeli” oleh tawaran negara.

Muhammadiyah sering menggunakan struktur kalimat yang menempatkan nilai-nilai moral atau hasil kajian ilmiah sebagai prasyarat tindakan. Implikasinya, agensi Muhammadiyah tidak bersifat tanpa syarat seperti NU, melainkan sangat bergantung pada terpenuhinya kriteria etis dan lingkungan. Hal ini memberikan pesan kepada jemaah bahwa Muhammadiyah tetap berdiri di atas prinsip kemandirian dan tidak akan ragu untuk meninggalkan kebijakan tersebut jika terbukti merugikan alam.

Tabel 6. Analisis Sintaksis Pada Portal *Muhammadiyah.or.id*

Strategi Sintaksis	Contoh Konstruksi Kalimat	Dampak Wacana
Kondisionalitas Etis	“ <i>Muhammadiyah akan mengembalikan IUP apabila ditemukan mafsadat</i> ”	Membangun posisi tawar yang kuat dan menjaga integritas moral.
Distansi Aktor	“ <i>Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan</i> ”	Mencitrakan diri sebagai organisasi yang rasional dan penuh pertimbangan.

Kolektivitas Inklusif	<i>“Kita memiliki tanggung jawab bersama menyelamatkan bumi”</i>	Mengalihkan fokus dari bisnis organisasi ke gerakan sosial jemaah.
Evaluasi Kritis	<i>“Kebijakan ini perlu dibahas dengan sangat seksama”</i>	Memposisikan organisasi sebagai pengkritik atau evaluator, bukan eksekutor.

Analisis terhadap struktur kalimat dalam portal *Muhammadiyah.or.id* menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan konstruksi yang kompleks, berhati-hati, dan bersifat kondisional sebagai strategi untuk menjaga kedaulatan organisasi di tengah isu-isu sensitif. Strategi pertama adalah penggunaan kondisionalitas etis yang bertujuan untuk menciptakan jaring pengaman moral atas keterlibatan organisasi dalam industri ekstraktif. Hal ini terlihat secara eksplisit dalam pernyataan bahwa:

“Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu apabila kemudian hari lebih banyak mafsadatnya,” (MD-15)

Yang berfungsi sebagai klausul pembatalan sepihak. Berdasarkan KBBI, kata “apabila” merupakan kata penghubung untuk menyatakan syarat atau janji.¹⁴⁴ Secara kritis, penggunaan struktur kalimat bersyarat ini menciptakan jarak

¹⁴⁴ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

(distansi) yang sengaja dibangun agar organisasi tidak terlihat terikat atau terbeli oleh tawaran negara. Dampaknya, agensi Muhammadiyah tidak bersifat tanpa syarat, melainkan sangat bergantung pada terpenuhinya kriteria etis, yang dalam teori wacana berfungsi sebagai mekanisme perlindungan reputasi (*reputational safeguard*).

Strategi kedua adalah penerapan distansi aktor melalui penggunaan negasi untuk membangun citra rasionalitas dan ketenangan birokratis. Strategi ini teridentifikasi dalam kalimat:

*“Muhammadiyah **tidak akan tergesa-gesa** mengambil keputusan terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.” (MD-03)*

KBBI mendefinisikan “tergesa-gesa” sebagai tindakan yang dilakukan dengan sangat cepat atau buru-buru. Dengan menyusun kalimat dalam bentuk penyangkalan “tidak akan”, Muhammadiyah secara diskursif membedakan dirinya dari persepsi umum mengenai organisasi masyarakat yang sering kali dipandang oportunistik. Implikasinya, struktur ini memberikan pesan kepada jemaah bahwa Muhammadiyah tetap berdiri di atas prinsip kemandirian dan tidak digerakkan oleh dorongan keuntungan ekonomi instan, melainkan oleh hasil kajian ilmiah yang mendalam.

Strategi ketiga melibatkan penggunaan kolektivitas inklusif yang berfungsi untuk mendistribusikan beban moral dari elite organisasi kepada basis massa. Narasi ini muncul dalam ajakan bahwa:

“Kita dapat membuat perubahan signifikan dalam pelestarian lingkungan” (MD-06)

Merujuk pada KBBI, kata “Kita” mencakup pembicara dan lawan bicara (inklusif).¹⁴⁵ Analisis kritis menunjukkan bahwa pemilihan struktur inklusif ini bertujuan untuk mengalihkan fokus dari tanggung jawab bisnis organisasi ke arah gerakan sosial kolektif jemaah. Dengan memposisikan penyelamatan bumi sebagai kewajiban “kita” semua, Muhammadiyah melakukan pengaburan fokus atas agensi organisasi dalam kebijakan pertambangan, sekaligus melakukan mobilisasi massa agar jemaah merasa memiliki andil dalam agenda lingkungan yang sedang dijalankan.

Terakhir, *Muhammadiyah.or.id* menggunakan struktur evaluasi kritis untuk memposisikan diri sebagai auditor moral di atas kebijakan negara. Hal ini terlihat dalam penekanan bahwa:

“Kebijakan ini perlu dibahas dengan sangat seksama agar tidak merugikan alam,” (MD-03).

Kata “perlu” menurut KBBI berarti harus dilakukan atau sangat penting. Secara diskursif, penempatan kata perlu di awal proposisi tindakan menempatkan organisasi bukan sebagai eksekutor buta, melainkan sebagai *evaluator* atau pengkritik kebijakan. Hal ini membangun posisi tawar yang kuat di hadapan negara; bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam diskursus ini bukan untuk menjadi bawahan regulasi, melainkan sebagai instrumen kontrol atas keserakahan ekonomi yang berpotensi melampaui batas ekologis. Melalui strategi sintaksis ini,

¹⁴⁵ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

Muhammadiyah sukses mengonstruksi diri sebagai aktor yang berdaulat, rasional, dan tetap berpegang teguh pada integritas moral di tengah dinamika ekonomi-politik yang kompleks.

4.3.1.3. Strategi Retorika

Retorika berkaitan dengan cara komunikator meyakinkan audiens melalui penggunaan gaya bahasa, metafora, dan otoritas. Sejalan dengan hal tersebut, Foss mendefinisikan retorika sebagai penggunaan simbol oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain guna mengubah persepsi atau memengaruhi lingkungan sosialnya.¹⁴⁶ Dalam studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), retorika merupakan inti dari *dakwah bil qalam* (dakwah melalui tulisan) yang bertujuan memengaruhi persepsi umat melalui simbol-simbol yang bermakna dan nilai-nilai transendental.¹⁴⁷

4.3.1.3.1. Retorika *Nu.or.id*

NU menggunakan metafora yang menggugah semangat kebanggaan institusional dan kemandirian finansial. Penggunaan metafora “Pintu Kemandirian” menggambarkan bahwa tambang adalah jalan keluar dari ketergantungan ekonomi yang selama ini membelenggu organisasi. Retorika NU seringkali bersifat optimis dan penuh dengan eufemisme untuk menghaluskan kesan eksploitasi alam.

¹⁴⁶ Foss, S. K, *Hetorical Criticism: Exploration and Practice*, 2017.

¹⁴⁷ SITI NURUL YAQINAH, *Harmoni Dakwah: Spirit Dakwah Dan Strategi Komunikasi Dalam Konservasi Lingkungan* (UIN Mataram Press, 2020).

Selain itu, retorika NU juga menekankan pada aspek “Tanggung Jawab”. Dengan menyebut pengelolaan tambang sebagai tugas yang dimandatkan oleh negara untuk kemaslahatan, NU berusaha membangkitkan militansi warga NU untuk mendukung langkah elit organisasi. Retorika ini efektif untuk membangun solidaritas internal di tengah gempuran kritik eksternal.

Tabel 7. Analisis Retorika Pada Portal Nu.or.id

Jenis Retorika	Metafora / Ungkapan Kunci	Makna Simbolis dan Dampak
Metafora Ekonomi	“ <i>Izin Usaha Pertambangan dapat melahirkan Kemandirian Organisasi</i> ”.	Membingkai tambang sebagai alat pembebasan dari ketergantungan finansial.
Eufemisme	“ <i>Terobosan Penting / Kebijakan Afirmasi</i> ”.	Menghaluskan kesan destruktif tambang menjadi aksi inovatif pemerintah.
Retorika Otoritas	“ <i>Langkah berani Presiden Joko Widodo</i> ”.	Membangun narasi kepemimpinan yang progresif dan harus didukung.
Simbolisme Kemaslahatan	“ <i>Sumber pendapatan untuk membiayai</i> ”	Melakukan religiusifikasi terhadap

	<i>organisasi dan melihat pengelolaan tambang sebagai peluang</i> ”.	keuntungan material dari ekstraksi.
--	--	-------------------------------------

Pertama yang digunakan oleh *Nu.or.id* adalah penggunaan metafora ekonomi yang menggugah semangat kebanggaan institusional. Metafora ini membingkai tambang bukan sebagai industri ekstraktif yang berisiko merusak lingkungan, melainkan sebagai jalan keluar dari ketergantungan ekonomi.

“Izin usaha pertambangan dapat melahirkan peluang kemandirian organisasi” (NU-05)

Berdasarkan KBBI, kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Secara kritis, penggunaan metafora “kemandirian” ini bertindak sebagai alat pembebasan finansial dari “belunggu” donasi atau ketergantungan politik masa lalu. Berdasarkan teori Lakoff & Johnson dalam *Metaphors We Live By*, metafora bukan sekadar kata indah, melainkan instrumen kognitif yang membentuk cara pandang manusia terhadap realitas.¹⁴⁸ Metafora ini sangat efektif untuk membungkam kritik internal, menolak tambang dicitrakan secara tidak langsung sebagai tindakan yang menghambat kedaulatan organisasi. Konsekuensinya, narasi ini menciptakan militansi internal yang melihat pengelolaan tambang sebagai tugas suci untuk membesarkan marwah institusi, sekaligus mengalihkan perhatian publik dari risiko biofisik yang nyata di lapangan.

¹⁴⁸ George Lakoff and Mark Jhonson, *Metaphors We Live By* (The University of Chicago Press, 1980).

Retorika NU juga dipenuhi dengan eufemisme yang bertujuan untuk memitigasi kesan destruktif dari pertambangan. *Nu.or.id* menggunakan istilah-istilah teknokratis yang terdengar inovatif untuk menggantikan diksi yang berpotensi memicu resistensi atau ketakutan ekologis.

*“Pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan dinilai sebagai bentuk **terobosan** penting dan kebijakan **afirmasi** (affirmative policy).” (NU-17)*

Penggunaan kata “Terobosan” (KBBI: langkah penting; penemuan baru) dan “Afirmasi” berfungsi untuk melakukan penghalusan makna (*euphemization*).¹⁴⁹ Secara kritis, aktivitas pengerukan sumber daya alam yang masif diubah menjadi sebuah aksi heroik pemerintah untuk memberikan keadilan bagi kelompok keagamaan. Hal ini sejalan dengan teori Fairclough mengenai mitigasi wacana, di mana bahasa digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah kebenaran yang pahit.¹⁵⁰ Implikasinya, kerusakan lingkungan dikesampingkan oleh terminologi kemajuan, sehingga pembaca lebih fokus pada aspek inovasi kebijakan tersebut daripada pada kerusakan ekosistem jangka panjang yang dihasilkan.

Struktur retorika selanjutnya adalah penggunaan otoritas untuk menunjukkan relasi harmonis antara organisasi dan kekuasaan negara, sekaligus memberikan stempel kebenaran pada kebijakan tersebut melalui pujian terhadap aktor pemberi izin.

¹⁴⁹ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹⁵⁰ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critic Study of Language* (Longman Publishing, New York, 1995), <https://www.felsemiotica.com/descargas/Fairclough-Norman-Critical-Discourse-Analysis.-The-Critical-Study-of-Language.pdf>.

*“Kebijakan ini merupakan langkah **berani** Presiden Joko Widodo dalam memberdayakan organisasi keagamaan.” (NU-01)*

Diksi “Berani” dalam KBBI bermakna mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya.¹⁵¹ Penulis menggunakan retorika otoritas ini untuk membangun narasi kepemimpinan yang progresif dan visioner. Secara kritis, pengagungan terhadap agensi presiden berfungsi sebagai perisai moral bagi organisasi. Jika langkah tersebut disebut “berani”, maka pihak yang mengkritik secara diskursif diposisikan sebagai pihak yang anti-kemajuan. Strategi ini mencerminkan komunikasi akomodatif *Nu.or.id* untuk memperkuat hubungan kemitraan strategis dengan negara, yang menurut Van Dijk merupakan teknik *positive self-presentation* guna meredam kritik publik melalui pengagungan agensi pemimpin.¹⁵²

Terakhir, kekuatan retorika terbesar dalam *Nu.or.id* adalah menghubungkan keuntungan material dengan nilai-nilai transendental atau spiritual.

*“PBNU membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai organisasi dan melihat pengelolaan tambang sebagai peluang **kemaslahatan**.” (NU-15)*

Peneliti melihat adanya upaya Religiusifikasi Ekonomi. Berdasarkan konsep Masalah (KBBI: kegunaan; kebaikan; manfaat), keuntungan dari hasil ekstraksi alam diletakkan dalam bingkai ibadah dan pelayanan umat. Secara kritis, ini adalah strategi untuk “mensucikan” motif ekonomi organisasi. Dengan menyebut bahwa

¹⁵¹ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹⁵² Dijk, *The Handbook of Discourse Analysis, Second Edition*.

hasil tambang digunakan untuk “membiayai organisasi” (pendidikan, dakwah, kesehatan), hambatan etis jemaah terhadap isu lingkungan menjadi luntur. Profit tambang tidak lagi dilihat sebagai pengerukan alam yang destruktif, melainkan sebagai instrumen suci untuk kemandirian umat. Hal ini selaras dengan konsep Bourdieu mengenai konversi modal ekonomi menjadi modal simbolis-keagamaan guna menutup celah perdebatan kritis di tingkat akar rumput.¹⁵³

4.3.1.3.2. Retorika *Muhammadiyah.or.id*

Muhammadiyah menggunakan retorika yang lebih menyentuh aspek emosional, etika jangka panjang, dan kelestarian ciptaan Tuhan. Metafora “Mewariskan mata air, bukan air mata” merupakan jargon retorik yang sangat kuat untuk membingkai isu lingkungan sebagai persoalan hidup dan mati generasi mendatang. Muhammadiyah juga menggunakan simbolisme “Sajadah Luas” untuk memaknai bahwa seluruh permukaan bumi adalah tempat suci yang harus dijaga kebersihannya, sehingga merusak alam setara dengan merusak tempat ibadah.

Strategi retorik Muhammadiyah juga banyak bersandar pada otoritas pakar dan hasil kajian akademik (*science-based*). Dengan sering menyebut kata “Pakar”, “Cendekiawan”, atau “Kajian”, Muhammadiyah berusaha membangun citra bahwa sikap mereka tidak didasarkan pada kepentingan politik sesaat, melainkan pada kebenaran objektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan agama.

¹⁵³ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK; Polity Press, 1991).

Tabel 8. Analisis Retorika Pada Portal Muhammadiyah.or.id

Jenis Retorika	Metafora / Ungkapan Kunci	Makna Simbolis dan Dampak
Metafora Ekologis	“Mewariskan mata air, bukan air mata”.	Menekankan etika keberlanjutan dan hak generasi masa depan.
Simbolisme Teologis	“Sajadah Luas” (Bumi sebagai tempat suci).	Meningkatkan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah.
Retorika Otoritas Ahli	“Science-based policy” / “Hasil Kajian”.	Membangun legitimasi melalui objektivitas sains dan intelektualitas.
Metafora Penjagaan	“Ormas sebagai Penjaga Moral Lingkungan”.	Menegaskan peran kritis ormas sebagai kontrol atas eksploitasi negara.

Strategi retorik pertama adalah penggunaan metafora ekologis yang bersifat puitis namun mengandung ancaman eksistensial guna membangun beban moral. Strategi ini terwujud dalam jargon yang sangat populer sebagaimana dalam kutipan teks berita berikut ini:

“Kita harus mewariskan **mata air**, bukan **air mata** kepada generasi mendatang,” (MD-11)

Kalimat ini digunakan sebagai instrumen untuk membingkai isu lingkungan sebagai persoalan hidup dan mati. Berdasarkan KBBI, “mata air” adalah sumber air yang mengalir keluar dari tanah, sedangkan “air mata” adalah cairan yang keluar dari mata karena rasa sedih atau sakit.¹⁵⁴ Secara kritis, permainan katapun ini berfungsi menciptakan kontras antara keberlangsungan hidup dan penderitaan absolut. Hal ini selaras dengan teori Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls, dimana narasi ini berfungsi untuk menciptakan rasa bersalah (*guilt-tripping*) bagi generasi saat ini.¹⁵⁵ *Muhammadiyah.or.id* memposisikan pelestarian alam sebagai “utang sejarah” yang harus dilunasi, sebuah strategi emotional framing untuk mempercepat mobilisasi aksi kolektif jemaah agar mendukung agenda hijau organisasi.

Strategi kedua adalah penerapan simbolisme teologis untuk melakukan sakralisasi terhadap alam sebagai ruang suci. Hal ini terlihat jelas dalam metafora yang digunakan untuk meluaskan cakupan religiositas, di mana portal tersebut menggambarkan:

*“konsep beragama melalui metafora **sajadah**, mulai dari sajadah pendek (urusan pribadi), sajadah panjang (urusan bersama), sajadah luas (ruang lintas batas).” (MD-10)*

KBBI mendefinisikan “sajadah” sebagai alas untuk salat (sujud). Secara diskursif, perluasan makna sajadah menjadi “sajadah luas” bertujuan untuk menghapus dikotomi antara ruang ritual (masjid) dengan ruang ekologis (alam).

¹⁵⁴ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹⁵⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (cambridge, massachusetts), 1971, https://www.hup.harvard.edu/file/feeds/PDF/9780674000780_sample.pdf.

Dalam perspektif Ekoteologi Islam (seperti pemikiran Seyyed Hossein Nasr), strategi ini sangat efektif untuk memobilisasi basis massa religius agar melihat aktivisme lingkungan bukan sebagai kegiatan sekuler, melainkan sebagai bentuk manifestasi iman yang nyata.¹⁵⁶ Dengan demikian, merusak alam secara retorik dikonstruksi setara dengan menodai tempat ibadah, yang memiliki konsekuensi eskatologis (akhirat) bagi pelakunya.

Strategi ketiga melibatkan penggunaan retorika otoritas ahli untuk membangun citra kebijakan berbasis sains (*science-based policy*). Muhammadiyah sering kali memvalidasi narasinya dengan menyebutkan kehadiran para intelektual untuk menghindari kesan “dakwah mimbar” yang tradisional, seperti dalam kutipan:

“Pakar Ilmu Lingkungan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), menyoroti pentingnya peran organisasi keagamaan dalam membangun advokasi lingkungan berbasis komunitas,” (MD-17).

Kata “pakar” menurut KBBI berarti orang yang ahli dalam suatu bidang ilmu. Analisis kritis menunjukkan bahwa penyebutan gelar akademik dan universitas secara berulang bertujuan untuk membangun hegemoni intelektual. Hal ini merujuk pada konsep Komunitas Epistemik (*Epistemic Community*) dari Peter M. Haas, dimana *Muhammadiyah.or.id* menggunakan pakar sebagai perisai intelektual.¹⁵⁷ Strategi ini meyakinkan publik bahwa sikap organisasi (termasuk isu transisi energi

¹⁵⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature (The Spiritual Crisis of Modern Man)* (British Library Cataloguing in Publication Data, 1968).

¹⁵⁷ Peter M. Haas, *Epistemic Communities and International Policy Coordination*, Vol. 46, No. 1, (1992), <https://www.jstor.org/stable/2706951>.

atau haji hijau) tidak didasarkan pada kepentingan politik pragmatis, melainkan pada kebenaran objektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan agama sekaligus.

Terakhir, portal ini menggunakan metafora penjagaan untuk menegaskan peran kritis ormas sebagai penyeimbang kekuasaan. Hal ini teridentifikasi dalam pernyataan resmi organisasi yang menegaskan:

*“Agama menjadi **penjaga** moral dalam melestarikan, mengelola, dan memuliakan lingkungan dengan tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan keberlanjutan” (MD-14).*

KBBI mengartikan “penjaga” sebagai orang yang bertugas menunggui atau mengawasi agar aman. Secara kritis, pemilihan retorika “penjaga moral” (bukan eksekutor bisnis) merupakan strategi untuk memposisikan Muhammadiyah di atas negara dan korporasi. Hal ini juga dinilai bahwa organisasi masyarakat sipil mengambil peran sebagai instruktur etika bagi negara. Strategi ini memberikan pesan kuat bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam diskursus sumber daya alam bertujuan untuk melakukan kontrol atas potensi keserakahan ekonomi yang berpotensi melampaui batas ekologis.

4.3.1.3.3. Kesimpulan Perbandingan Dimensi Teks (Level Mikro)

Berdasarkan analisis pada aspek leksikon, sintaksis, dan retorika, dapat disimpulkan bahwa portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* membangun konstruksi teks yang berbeda dalam merepresentasikan isu ekstraktivisme.

Nu.or.id cenderung menggunakan diksi yang bersifat afirmatif, akomodatif, dan legitimatif, dengan struktur sintaksis yang menonjolkan kepastian sikap organisasi serta retorika yang diarahkan untuk menormalisasi keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang sebagai bagian dari kemaslahatan dan kemandirian umat. Sebaliknya, *Muhammadiyah.or.id* lebih menonjolkan diksi yang hati-hati, etik, dan prosedural, dengan pola sintaksis yang lebih argumentatif serta retorika yang menekankan kehati-hatian moral, rasionalitas organisasi, dan perlunya prasyarat ekologis sebelum tambang diterima sebagai pilihan kelembagaan.

Dengan demikian, pada level mikro, perbedaan kedua portal tidak hanya tampak pada pilihan bahasa, tetapi juga pada arah ideologis teks: *Nu.or.id* lebih berorientasi pada legitimasi pragmatis atas kebijakan ekstraktif, sedangkan *Muhammadiyah.or.id* lebih berorientasi pada pembatasan etik terhadap logika ekstraktivisme. Temuan ini sejalan dengan pemetaan intensitas wacana yang menunjukkan dominasi pragmatisme ekonomi pada NU dan penekanan lebih tinggi pada Green Islam di Muhammadiyah.

4.3.2 Analisis Dimensi Kognisi Sosial: Negosiasi Ideologi “Green Islam”

Analisis level mezo berfokus pada dimensi kognisi sosial (*social cognition*) yang menjadi jembatan antara teks (mikro) dan konteks sosial (makro). Menurut Teun A. van Dijk, wacana tidak diproduksi secara terisolasi, melainkan melalui proses kognitif yang dipengaruhi oleh ideologi kelompok dan tujuan institusional organisasi.

Pada bagian ini, penelitian mendalami bagaimana struktur organisasi, pandangan para elit (seperti Ketum PBNU atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah), dan negosiasi ideologi *Green Islam* membentuk narasi mengenai ekstraktivisme. Analisis mezo ini bertujuan mengungkap bagaimana “kebenaran” versi organisasi diproduksi, disaring, dan dikemas sedemikian rupa untuk mengarahkan opini jemaah (akar rumput) agar selaras dengan posisi strategis institusi.

4.3.2.1. Instruksi Organisasi dalam Teks

Instruksi organisasi mencerminkan bagaimana otoritas pusat mendistribusikan kebijakan melalui kanal media resmi. Hasil analisis menunjukkan perbedaan pola komunikasi internal yang sangat kontras antara NU dan Muhammadiyah dalam merespons tawaran pengelolaan tambang.

4.3.2.1.1. Pola Instruksi *Nu.or.id*

Wacana pada portal *Nu.or.id* menunjukkan pola produksi yang sangat tersentralisasi pada mandat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Teks yang muncul cenderung bersifat “sosialisasi” atas keputusan yang sudah final. Instruksi organisasi terlihat kuat melalui narasi “Kesiapan Perangkat” dan “Mandat”. Representasi ideologis yang dibangun adalah ketaatan kolektif (*sami'na wa atha'na*) terhadap ijtihad elit organisasi demi kemaslahatan ekonomi institusi.

Dalam produksi wacananya, portal NU menekankan bahwa pengelolaan tambang bukan sekadar urusan bisnis, melainkan “tugas dan tanggung jawab” yang diberikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kognisi sosial para komunikator NU

dipengaruhi oleh persepsi bahwa NU adalah “mitra strategis” negara. Akibatnya, instruksi organisasi yang diproduksi bertujuan untuk memitigasi keraguan di tingkat akar rumput dengan menunjukkan bahwa NU memiliki infrastruktur bisnis yang lengkap dan jaringan hingga tingkat desa untuk mengelola manfaat tambang tersebut secara langsung.

Tabel 9. Analisis Instruksi Organisasi Pada Portal Nu.or.id

Kategori Analisis	Temuan Data (Nodes NVivo)	Implikasi Produksi Wacana
Pola Instruksi	<i>Sentralistik-Top Down</i> (Mandat PBNU).	Meminimalkan perdebatan internal di level publik dan mengukuhkan legitimasi keputusan pusat sebagai representasi organisasi.
Fokus Pesan	Kesiapan SDM, Perangkat Organisasi, Jaringan Bisnis yang Kuat.	Membangun persepsi bahwa NU memiliki kapasitas manajerial yang setara dengan korporasi profesional.
Justifikasi Otoritas	“Dimandatkan”, “Tanggung Jawab Mulia”, “Terima Kasih Presiden”.	Mengonstruksi kebijakan tambang sebagai rezeki teologis dan bentuk

		apresiasi negara terhadap kontribusi NU.
Tujuan Diskursif	Penyeragaman opini jemaah terkait WIUPK.	Menutup celah kritik internal dengan menonjolkan soliditas struktur organisasi dari pusat hingga desa.

Berdasarkan temuan data, pola instruksi yang diproduksi oleh *Nu.or.id* bersifat *Sentralistik-Top Down* yang bersumber langsung dari Mandat PBNU. Secara kritis, pola komunikasi satu arah ini mencerminkan mekanisme pertahanan institusional untuk memitigasi adanya fragmentasi suara di tingkat basis.

Menurut teori *Power in Discourse* dari Fairclough, pola instruksi yang tersentralisasi berfungsi untuk mengukuhkan legitimasi keputusan pusat sebagai satu-satunya representasi sah organisasi.¹⁵⁸ Dengan meniadakan ruang dialektika dalam teks instruksinya, media ini berhasil meminimalkan perdebatan internal di level publik. Implikasi sosiopolitiknya adalah terciptanya kesan soliditas yang absolut, di mana keputusan elit pimpinan dikonstruksi sebagai kehendak kolektif yang harus dipatuhi tanpa syarat oleh jemaah.

Fokus pesan yang ditonjolkan dalam instruksi organisasi adalah Kesiapan SDM, Perangkat Organisasi, dan Jaringan Bisnis yang Kuat. Penggunaan diksi

¹⁵⁸ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critic Study of Language*.

manajerial ini merupakan upaya kognitif untuk menggeser citra organisasi dari entitas keagamaan tradisional menuju entitas korporasi yang profesional.

Peneliti melihat fenomena ini sebagai bentuk *Marketization of Discourse*, dimana organisasi *non-profit* mengadopsi gaya bahasa bisnis untuk membangun kredibilitas.¹⁵⁹ Fokus pesan ini bertujuan membangun persepsi bahwa NU memiliki kapasitas manajerial yang setara dengan korporasi profesional. Dengan menonjolkan “Kekuatan Jaringan”, kognisi pembaca digiring untuk memercayai bahwa organisasi memiliki kontrol penuh dan kompetensi teknis yang memadai, sehingga stigma negatif mengenai ketidakmampuan ormas dalam mengelola sektor industri ekstraktif dapat diredam secara efektif.

Justifikasi otoritas dalam instruksi organisasi dibangun melalui penggunaan leksikon yang memiliki beban moral dan kenegaraan yang tinggi, seperti “Dimandatkan”, “Tanggung Jawab”, dan ungkapan “Terima Kasih Presiden”. Dapat di lihat dari kutipan teks berita berikut:

*“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah **dimandatkan** kepada NU untuk mengelolanya” (NU-01)*

*“Pemberian izintambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah merupakan **tanggung jawab** yang harus dilaksanakan dengan sebaik-aiknya agar tujuan mulia dari kebijakan itu sungguh-sungguh tercapai.” (NU-01)*

¹⁵⁹ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critic Study of Language*.

“PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas” (NU-01)

Secara kritis, penggunaan diksi ini merupakan strategi Authorization sebagaimana dijelaskan oleh Van Leeuwen (2008). Legitimasi kebijakan tambang tidak didasarkan pada argumen ekonomi semata, melainkan pada otoritas pemberi perintah (Presiden) dan sifat tugas itu sendiri (Tanggung Jawab). Hal ini mengonstruksi kebijakan tambang sebagai rezeki teologis dan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU. Dengan menyebutnya sebagai “Mandat”, motif profit organisasi disamarkan menjadi narasi pengabdian nasional, sehingga setiap kritik terhadap kebijakan tersebut secara otomatis dicitrakan sebagai tindakan yang tidak menghargai apresiasi negara.

Tujuan diskursif utama dari instruksi ini adalah Penyeragaman opini jemaah terkait WIUPK. Strategi ini dilakukan dengan cara menonjolkan soliditas struktur organisasi dari tingkat pusat hingga ke desa-desa.

Analisis sosiolinguistik menunjukkan bahwa narasi soliditas ini merupakan upaya *Manufacturing Consent*, yakni pembentukan persetujuan kolektif melalui manipulasi informasi dan tekanan struktural.¹⁶⁰ Dengan menekankan bahwa seluruh jaringan organisasi bergerak serentak, portal *Nu.or.id* secara efektif menutup celah bagi munculnya kritik internal. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa tidak ada resistensi dari tingkat akar rumput dengan cara memberikan kepastian kognitif bahwa kebijakan tersebut bermanfaat bagi seluruh jemaah,

¹⁶⁰ Edward S. Herman and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent (The Political Economy of the Mass Media)* (The Bodley, n.d.).

sehingga solidaritas organisasi tetap terjaga di bawah kepemimpinan tunggal PBNU.

4.3.2.1.2. Pola Instruksi *Muhammadiyah.or.id*

Sedangkan pada portal *Muhammadiyah.or.id* menampilkan pola instruksi yang berbeda, yakni bersifat kolegial-konsultatif dan “penundaan produktif”. Teks diproduksi melalui proses evaluasi yang melibatkan berbagai majelis (seperti Majelis Tarjih, Majelis Lingkungan Hidup, dan Majelis Hukum). Instruksi organisasi sering kali muncul dalam bentuk “Rekomendasi Kebijakan” atau “Pertimbangan Seksama”. Representasi ideologis yang ditunjukkan adalah sikap *scientific-based* yang mengutamakan kajian akademik sebelum mengambil sikap final.

Dalam proses produksinya, portal Muhammadiyah memberikan ruang bagi narasi kewaspadaan. Instruksi organisasi tidak bersifat mobilisasi massa untuk mendukung kebijakan, melainkan instruksi untuk “mengukur kemampuan diri”. Implikasi dari pola ini adalah terciptanya citra organisasi yang independen, rasional, dan tidak oportunistik. Muhammadiyah memposisikan teks portalnya sebagai ruang edukasi bagi jemaah agar memahami risiko industri ekstraktif sebelum membicarakan keuntungan materi.

Tabel 10. Analisis Instruksi Organisasi Pada Portal Muhammadiyah.or.id

Kategori Analisis	Temuan Data (Nodes NVivo)	Implikasi Produksi Wacana
Pola Instruksi	<i>Kolegial-Konsultatif (Kajian Lintas Majelis dan Pakar).</i>	Memberikan kesan transparansi dan proses pengambilan keputusan yang demokratis-intelektual.
Fokus Pesan	Evaluasi Risiko, Seksama, Tidak Tergesa-gesa.	Menempatkan organisasi sebagai entitas yang sangat berhati-hati agar tidak terjerat kepentingan pragmatis sesaat.
Justifikasi Otoritas	“ <i>Pertimbangan Seksama</i> ”, “ <i>Rekomendasi Kebijakan</i> ”, “ <i>Amanah</i> ”.	Mengonstruksi sikap organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada Tuhan dan generasi masa depan.
Tujuan Diskursif	Menjaga integritas dan independensi persyarikatan.	Menegaskan bahwa Muhammadiyah tetap berdiri di atas nilai independensi meskipun ada tawaran dari pemerintah.

Analisis terhadap kognisi institusional dalam portal *Muhammadiyah.or.id* menunjukkan bahwa teks diproduksi melalui proses birokrasi yang bersifat kolegal-konsultatif, yang berfungsi sebagai “penundaan produktif” untuk membangun legitimasi. Pola instruksi pertama ditandai dengan pengutamaan kajian lintas majelis guna memastikan keselarasan antara nilai teologis dan teknis. Hal ini terlihat dalam proses pengambilan keputusan strategis, di mana dinyatakan bahwa:

“Keputusan resmi tersebut diambil oleh Muhammadiyah melalui pertimbangan yang seksama,” (MD-15)

Setelah melibatkan berbagai majelis seperti Majelis Tarjih dan Majelis Lingkungan Hidup. Secara kritis, pola instruksi ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak menggunakan sistem komando tunggal yang emosional, melainkan sistem “intelektual kolektif”. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kesan transparansi dan kehati-hatian, sehingga organisasi memiliki ruang untuk mengevaluasi risiko politik sebelum memberikan pernyataan final.

Pola kedua melibatkan penggunaan mekanisme audit sebagai bentuk formalisasi ideologi *Green Islam* ke dalam struktur Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Hal ini nampak jelas saat organisasi melakukan penertiban internal melalui pernyataan bahwa,

*“MLH telah melakukan **audit** energi terhadap organisasi maupun Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di beberapa daerah,” (MD-12).*

Kata “audit” menurut KBBI berarti pemeriksaan pembukuan atau pengujian kebenaran.¹⁶¹ Secara diskursif, penyematan istilah “audit” dalam instruksi lingkungan menunjukkan adanya pergeseran kognisi organisasi dari dakwah mimbar menuju dakwah manajerial. Muhammadiyah menggunakan standar teknokratis untuk memastikan bahwa ideologi hijaunya terimplementasi secara terukur di ribuan institusi di bawah naungannya. Hal ini merupakan bentuk hegemoni internal yang disiplin, dimana ketaatan beragama diukur melalui efisiensi energi dan pengelolaan limbah.

Terakhir, pola instruksi Muhammadiyah menonjolkan aspek kemandirian institusional melalui narasi:

“Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan juga negara”.(MD-03)

KBBI mengartikan “kemampuan” berarti kesanggupan, kecakapan, atau kekayaan.¹⁶² Secara kritis, instruksi untuk mengukur kemampuan diri merupakan representasi dari konsep *Organizational Autonomy* (Otonomi Organisasi). Secara kritis, instruksi mengukur kemampuan diri ini berfungsi sebagai *counter discourse* terhadap persepsi publik mengenai ormas yang oportunistik. Muhammadiyah memosisikan dirinya sebagai entitas yang independen dan rasional, yang berani melakukan penundaan terhadap kebijakan negara jika prasyarat etis dan ilmiah

¹⁶¹ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹⁶² DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

belum terpenuhi. Melalui manajemen instruksi ini, Muhammadiyah sukses mengonstruksi diri bukan sebagai eksekutor bisnis negara, melainkan sebagai Penjaga Moral Lingkungan yang tetap berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan umat di atas keuntungan materi sesaat.

4.3.2.2. Negosiasi Ideologi Green Islam

Ideologi *Green Islam* atau Islam Hijau merupakan doktrin yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai Khalifah dalam melestarikan ekosistem. Dalam isu ekstraktivisme, terjadi negosiasi ideologis yang kompleks di mana nilai-nilai pelestarian alam harus berhadapan dengan tuntutan ekonomi industri.

4.3.2.2.1. Negosiasi *Green Islam Nu.or.id*

Pada portal *Nu.or.id*, ideologi *Green Islam* mengalami segmentasi habitat. Melalui pandangan tokoh seperti Ulil Abshar Abdalla, NU membedakan antara *Small Habitat* (lingkungan mikro/fiqih harian) dan *Big Habitat* (lingkungan global atau ideologi lingkungan). Negosiasi ini memungkinkan NU untuk tetap mendukung *Green Islam* pada level mikro seperti pengelolaan sampah atau ekologi spiritual, namun secara simultan mendukung industri ekstraktif makro (tambang) atas nama “Kemaslahatan Sosial”.

Konsekuensi dari negosiasi ini adalah munculnya narasi “Tambang yang Ramah Lingkungan”. Ideologi *Green Islam* disini tidak digunakan sebagai alat resistensi terhadap tambang, melainkan sebagai instrumen mitigasi. Wacana yang

diproduksi mencoba meyakinkan pembaca bahwa kerusakan lingkungan akibat tambang dapat ditangani selama pengelolaannya didasarkan pada nilai-nilai agama dan profesionalisme.

Tabel 11. Negosiasi Green Islam Pada Portal Nu.or.id

Bentuk Negosiasi	Narasi Kunci	Makna Ideologis
Segmentasi Habitat	Membedakan <i>Small Habitat vs Big Habitat.</i>	Memisahkan urusan lingkungan harian (sampah) dengan kebijakan industri makro (tambang) untuk menghindari kontradiksi.
Interpretasi Masalah	<i>“Kemaslahatan Sosial dan Lingkungan”.</i>	Menyeimbangkan antara pelestarian alam dengan kebutuhan ekonomi jemaah (pendekatan antroposentris).
Ekologi Spiritual	Fokus pada perubahan perilaku individu.	Mengalihkan fokus wacana dari kerusakan struktural akibat ekstraksi ke gerakan moral personal (pengelolaan sampah).
Redistribusi SDA	<i>“Redistribusi sumber daya harus adil”.</i>	Menilai bahwa keadilan lingkungan baru tercipta jika

		ormas (rakyat) ikut mengelola, bukan hanya korporasi.
--	--	--

Berdasarkan pandangan tokoh organisasi, portal *Nu.or.id* melakukan pemisahan ruang tanggung jawab ekologis melalui konsep Segmentasi Habitat. Strategi ini membedakan antara *Small Habitat* (lingkungan mikro/fiqih harian) dan *Big Habitat* (lingkungan global/ideologi).

Secara kritis, pemisahan ini merupakan bentuk Kompartementalisasi Kognitif, dimana individu atau organisasi membagi sistem nilai mereka menjadi bagian-bagian yang terisolasi untuk menghindari disonansi kognitif. Dengan membatasi kesadaran lingkungan jemaah pada isu sampah atau sanitasi (*Small Habitat*), media ini secara efektif mengalihkan pengawasan moral dari dampak destruktif industri pertambangan (*Big Habitat*). Hal ini selaras dengan teori *Ecological Citizenship* dari Dobson, di mana fokus pada perilaku mikro sering kali digunakan untuk “menjinakkan” daya kritis warga terhadap kebijakan makro yang merusak lingkungan secara sistemik.

Sedangkan untuk, negosiasi dilakukan dengan melakukan reinterpretasi terhadap konsep Masalahah (kemaslahatan). Wacana yang diproduksi mengonstruksi narasi bahwa pelestarian alam harus tunduk pada pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia.

Analisis sosiolinguistik menunjukkan adanya penggunaan Pendekatan Antroposentris yang kental. Paradigma ini, sebagaimana dikritik oleh Keraf, dalam Etika Lingkungan Hidup, menempatkan alam hanya sebagai instrumen utilitas bagi

kepentingan manusia. Dalam skema kognitif ini, alam tidak dipandang memiliki nilai intrinsik (*ecocentric*), melainkan nilai instrumental (*utilitarian*).¹⁶³ Strategi ini selaras dengan konsep Shallow Ecology yang dicetuskan oleh Arne Naess, dimana pelestarian alam hanya dilakukan sejauh mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia (dalam hal ini kesejahteraan ekonomi jemaah).¹⁶⁴ Strategi ini berfungsi untuk melegitimasi narasi Tambang yang Ramah Lingkungan, di mana kerusakan ekosistem dianggap “terbayar” oleh manfaat finansial yang dihasilkan untuk organisasi.

Temuan penting lainnya adalah penggunaan konsep “Ekologi Spiritual” untuk memindahkan beban tanggung jawab ekologis dari aktor struktural (korporasi/negara) ke bahu individu (jemaah/santri).

Dalam kajian sosiologi lingkungan, strategi ini dikenal sebagai Responsibilisasi (*Responsibilization*). Dengan memfokuskan wacana pada perubahan perilaku individu dan gerakan moral personal (seperti pengelolaan sampah), media *Nu.or.id* secara halus mengalihkan fokus wacana dari kerusakan struktural akibat ekstraksi. Menurut teori Risk Society dari Ulrich, strategi ini efektif untuk meredam kritik struktural karena isu lingkungan “disempitkan” menjadi isu moralitas personal.¹⁶⁵ Selain itu, Seyyed Hossein Nasr dalam *Man and Nature* mengingatkan bahwa spiritualitas yang terputus dari aksi struktural terhadap

¹⁶³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Penerbit Buku Kompas, 2010), <https://eprints.upj.ac.id/eprint/6959/1/Resensi%20Buku%20Etika%20Lingkungan%20Hidup%20-%20Dhafa%20Andika%20Pratama.pdf>.

¹⁶⁴ Arne Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement*, 2005, https://openairphilosophy.org/wp-content/uploads/2018/11/OAP_Naess_Shallow_and_the_Deep.pdf.

¹⁶⁵ Putri Kusvianti et al., *Pandangan Ulrich Beck Tentang Risiko Dan Ketidakpastian Yang Dialami Oleh Masyarakat Modern (Beck's View of the Risk and Uncertainty Experienced in Modern Society)*, 23 Nomor 1 (2023), <https://doi.org/10.35965/eeco.v23i1.249>.

krisis lingkungan dapat terjebak pada eskapisme yang mengabaikan penderitaan alam akibat industrialisasi masif.¹⁶⁶

Terakhir, negosiasi ideologis dilakukan dengan membingkai keterlibatan ormas dalam tambang sebagai manifestasi dari keadilan lingkungan. Narasi yang dibangun adalah bahwa keadilan baru tercipta jika rakyat (melalui ormas) ikut mengelola sumber daya, bukan hanya korporasi murni.

Secara kritis, peneliti menemukan adanya penggunaan narasi *Resource Nationalism* (Nasionalisme Sumber Daya). Konsep keadilan lingkungan (*Environmental Justice*) diubah definisinya dari “perlindungan terhadap perusakan alam” menjadi “pemerataan hak untuk melakukan eksploitasi”. Negosiasi ini sangat krusial untuk menangkis resistensi; ormas diposisikan sebagai “penyelamat” aset negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Martinez-Alier dalam *The Environmentalism of the Poor*, narasi keadilan sering kali digunakan untuk membenarkan akses ekonomi atas nama distribusi kesejahteraan, meskipun hal tersebut harus mengorbankan integritas ekologis wilayah tersebut.¹⁶⁷

4.3.2.2.2. Negosiasi *Green Islam Muhammadiyah.or.id*

Muhammadiyah menegosiasikan *Green Islam* sebagai identitas universal yang tidak dapat dikompromikan. Wacana Muhammadiyah menekankan pada metafora “Mata air bukan air mata” dan “Sajadah Luas”. *Green Islam* bagi Muhammadiyah adalah kewajiban teologis yang setara dengan ibadah mahdhah.

¹⁶⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature (The Spiritual Crisis of Modern Man)*.

¹⁶⁷ Joan Martinez-Alier, *The Environmentalism of the Poor* (WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, n.d.), <https://cdn.unrisd.org/assets/library/papers/pdf-files/martinezalier.pdf>.

Negosiasi ideologis mereka tampak dalam upaya mengawinkan nilai agama dengan sains global.

Implikasi dari negosiasi ini adalah posisi “Penjaga Moral”. Muhammadiyah memposisikan teks portalnya sebagai alat advokasi untuk melawan eksploitasi yang merusak. Melalui kolaborasi dengan organisasi lintas iman seperti *Greenfaith*, Muhammadiyah menunjukkan bahwa ideologi Islam Hijau adalah bagian dari gerakan penyelamatan bumi secara global. Mereka menolak pragmatisme jika hal tersebut berbenturan dengan prinsip keberlanjutan ekologis.

Tabel 12. Negosiasi Ideologi Green Islam Pada Portal Muhammadiyah.or.id

Bentuk Negosiasi	Narasi Kunci	Makna Ideologis
Etika Antargenerasi	<i>“Mewariskan mata air, bukan air mata”.</i>	Menjadikan hak generasi masa depan sebagai filter utama dalam setiap kebijakan ekstraktif.
Simbolisme Teologis	<i>“Sajadah Luas” (Bumi sebagai tempat suci).</i>	Melakukan sakralisasi terhadap alam sehingga merusak lingkungan dianggap merusak tempat ibadah.
Integrasi Sains	Penggunaan data pakar dan hasil riset kampus.	Memperkuat doktrin agama dengan argumen ilmiah untuk

		membangun posisi tawar yang rasional-kritis.
Advokasi Global	Kerjasama dengan Greenfaith dan British Embassy.	Menempatkan isu lingkungan sebagai masalah kemanusiaan universal yang melampaui sekat sektarian.

Bentuk negosiasi pertama dilakukan melalui Etika Antargenerasi yang mengaitkan nilai eskatologis (akhirat) dengan hak ekologis manusia masa depan. Hal ini teridentifikasi dalam jargon retorik yang sangat kuat, yakni pernyataan bahwa:

“Generai mendatang memiliki hak yang sama untuk menikmati bumi yang sehat. Kita harus mewariskan mata air, bukan air mata.” (MD-11).

Secara kritis, narasi ini merupakan implementasi dari teori Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Justice*) yang dikembangkan oleh John Rawls.¹⁶⁸ Muhammadiyah menegosiasikan makna “warisan” (tirkah) yang biasanya bersifat materi-individual menjadi warisan ekosistem-kolektif. Strategi ini menciptakan beban moral (*guilt-tripping*) bagi jemaah bahwa mengabaikan lingkungan berarti melakukan tindakan “durhaka sejarah” yang akan mengakibatkan penderitaan

¹⁶⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*.

absolut bagi anak-cucu, sebuah posisi yang menempatkan keadilan lingkungan di pusat kesalehan sosial.

Kedua, Muhammadiyah melakukan negosiasi melalui Simbolisme Teologis yang radikal dengan menghapus batas antara ruang ritual dan ruang publik. Strategi ini nampak dalam penggunaan metafora spasial yang menyatakan bahwa, “Sajadah luas.” Berdasarkan perspektif Ekoteologi Islam sebagaimana dipopulerkan oleh Seyyed Hossein Nasr, negosiasi ini bertujuan melakukan sakralisasi alam.¹⁶⁹ Jika alam diperlakukan sama sucinya dengan karpet masjid, maka tindakan merusak lingkungan (eksploitasi berlebih) secara otomatis dikonstruksi sebagai tindakan “menodai tempat ibadah”. Dampak wacana ini sangat krusial untuk memobilisasi massa religius agar melihat aktivisme lingkungan bukan sebagai kegiatan sekuler, melainkan sebagai bentuk manifestasi iman yang esensial.

Ketiga, terdapat negosiasi berupa Integrasi Sains Global ke dalam doktrin agama untuk membangun posisi tawar yang rasional-kritis di hadapan otoritas negara. Muhammadiyah tidak lagi bicara lingkungan hanya melalui interpretasi ayat, melainkan dengan memvalidasi sikap mereka menggunakan data teknokratis dan peran Pakar Ilmu Lingkungan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Hal ini merujuk pada pembentukan Komunitas Epistemik (*Epistemic Community*) oleh Peter M. Haas, di mana Muhammadiyah menggunakan otoritas pengetahuan pakar sebagai “perisai intelektual”.¹⁷⁰ Dengan menyandingkan Fiqh dengan riset kampus, Muhammadiyah membangun identitas “Islam Berkemajuan” sebagai kekuatan

¹⁶⁹ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature (The Spiritual Crisis of Modern Man)*.

¹⁷⁰ Peter M. Haas, *Epistemic Communities and International Policy Coordination*.

saintifik-religius, sehingga suara mereka dalam mengevaluasi kebijakan ekstraktif memiliki legitimasi intelektual yang sulit dibantah oleh pemerintah maupun korporasi.

Terakhir, negosiasi ideologi *Green Islam* diarahkan pada Advokasi Global lintas iman untuk membangun citra sebagai Penjaga Moral. Hal ini terwujud dalam kolaborasi transnasional seperti dengan *Greenfaith* dan *British Embassy* yang menjadi bagian dari komitmen global Muhammadiyah dalam isu perubahan iklim. Secara diskursif, negosiasi ini menempatkan Muhammadiyah dalam jaringan *Global Civil Society*. Berdasarkan konsep *Social License to Operate* (SLO),¹⁷¹ Muhammadiyah sedang mengonstruksi legitimasi sosial yang melampaui izin legal dari negara. Muhammadiyah menolak pragmatisme ekonomi jika berbenturan dengan prinsip keberlanjutan, sekaligus memosisikan diri sebagai pengawas etika yang memegang kendali atas kedaulatan moral bangsa di tingkat internasional.

4.3.2.3. Dialektika Pragmatisme Ekonomi

Sub-bab ini membedah “kejujuran” wacana terkait realitas finansial organisasi. Terjadi dialektika antara idealisme keagamaan dengan tuntutan ekonomi institusi yang semakin besar seiring dengan perkembangan amal usaha.

¹⁷¹ Konstantinos Komnitsas, *Social License to Operate in Mining: Present Views and Future Trends*, 2020, <https://doi.org/doi:10.3390/resources9060079>.

4.3.2.3.1. Pragmatisme Terbuka *Nu.or.id*

NU secara eksplisit mengakui adanya kebutuhan operasional organisasi yang sangat besar. Teks pada portal *Nu.or.id* diproduksi untuk melakukan normalisasi terhadap keterlibatan ormas dalam bisnis tambang. Retorika “*Affirmative Policy*” digunakan sebagai dialektika: negara selama ini mengabaikan ormas dalam distribusi SDA, maka pemberian konsesi tambang adalah bentuk pemihakan ekonomi.

Dampak kognitif dari wacana ini adalah hilangnya hambatan moral jemaah terhadap industri tambang. Tambang tidak lagi dilihat sebagai musuh lingkungan, melainkan sebagai “Rezeki” dan “Pintu Kemandirian”. Dialektika ini menyimpulkan bahwa kemandirian finansial NU akan berdampak langsung pada kesejahteraan umat di akar rumput melalui layanan pendidikan dan kesehatan yang didanai dari hasil tambang.

Tabel 13. Dialektika Pragmatisme Ekonomi Pada Portal *Nu.or.id*

Unsur Dialektika	Temuan Wacana (Nodes NVivo)	Konsekuensi Kognisi Sosial
Tuntutan Riil	Biaya operasional besar,	Mengonstruksi urgensi ekonomi sebagai alasan logis untuk menerima tawaran tambang.
Justifikasi Ekonomi	“ <i>Affirmative Policy</i> ”, “ <i>Revenue untuk warga</i> ”.	Membangun keyakinan bahwa profit tambang adalah

		instrumen redistribusi kekayaan untuk rakyat.
Normalisasi Bisnis	<i>“Pengurus NU jadi bisnismen itu biasa”</i> .	Meredam stigma negatif tentang kiai atau ormas yang terjun ke dunia industri ekstraktif.
Sintesis Wacana	Tambang = Kemandirian Finansial Umat.	Mengintegrasikan logika pasar ke dalam logika dakwah melalui eufemisme <i>“Kemaslahatan”</i> .

Sub-bab ini membedah mekanisme “kejujuran” wacana terkait realitas finansial institusi. Peneliti menemukan adanya dialektika yang tajam antara idealisme keagamaan dengan tuntutan ekonomi institusi yang membengkak seiring dengan ekspansi amal usaha.

Portal *Nu.or.id* secara eksplisit mengakui adanya kebutuhan operasional organisasi yang sangat besar sebagai alasan logis (urgensi) untuk menerima konsesi tambang. Ditemukan narasi *“Kebutuhan organisasi yang cukup besar”* (NU-03). Narasi ini, jika dilihat secara sosiolinguistik, merupakan bentuk Justifikasi Urgensi. *Nu.or.id* berusaha membangun skema mental bahwa “hambatan moral” terhadap industri tambang harus dikalahkan oleh “urgensi ekonomi” demi kelangsungan hidup (*survival*) institusi. Disini, nilai agama mengalami pergeseran paradigma menuju Utilitarianisme. Kebenaran sebuah kebijakan tidak lagi diukur dari

integritas ekologisnya, melainkan dari kemampuannya membiayai layanan sosial. Strategi ini, menurut Fairclough, merupakan bagian dari *Marketization of Discourse*,¹⁷² dimana logika pasar masuk ke dalam ruang dakwah, memaksa jemaah menerima profit ekonomi sebagai prasyarat bagi tegaknya martabat organisasi.

Penggunaan istilah teknokratis seperti *Affirmative Policy* digunakan untuk membingkai suatu keuntungan politik sebagai bentuk keadilan sejarah. Pemilihan Retorika *Affirmative Policy* dinilai sebagai dialektika bahwa pemberian konsesi tambang adalah bentuk pemihakan ekonomi negara terhadap rakyat (ormas). Secara kritis, penggunaan leksikon asing ini bertujuan untuk melakukan Intelektualisasi Keuntungan. Selain itu, Portal *Nu.or.id* berusaha meyakinkan publik bahwa keterlibatan NU dalam tambang adalah “hak” yang selama ini dirampas oleh korporasi asing. Strategi ini sangat efektif untuk membangun sentimen Nasionalisme Ekonomi jemaah. Hal ini selaras dengan teori Legitimasi dari Van Dijk, dimana kelompok dominan menggunakan strategi *positive self-presentation* guna menutupi kepentingan material di balik label “pemihakan rakyat”.¹⁷³

Wacana yang diproduksi berusaha meredam stigma negatif mengenai keterlibatan kaum rohaniwan dalam industri ekstraktif.

“saya ini ketua umum PBNU, saya juga kiai pesantren dan sebagainya, Pak Ulil abshar juga pengurus PBNU, dia juga punya warung di rumah. Jadi pengurus PBNU ini bisa macam-macam, dan urusan bisnis itu bukan urusan PBNU” (NU-17)

¹⁷² Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critic Study of Language*.

¹⁷³ Dijk, *The Handbook of Discourse Analysis, Second Edition*.

Peneliti melihat adanya upaya Normalisasi Bisnis melalui konversi modal. Berdasarkan teori Pierre Bourdieu (1991) mengenai Symbolic Capital, PBNU sedang menggunakan otoritas keagamaannya untuk memberikan “stempel halal” pada aktivitas bisnis tambang.¹⁷⁴ Dengan menyebut kiai yang berbisnis sebagai hal yang “biasa”, portal *Nu.or.id* secara sadar sedang menghapus batasan sakral-profane. Tujuannya adalah untuk mematikan debat kritis di akar rumput mengenai etika lingkungan dengan mengalihkannya pada isu fungsionalisme organisasi.

4.3.2.3.2. Pragmatisme Inovatif Muhammadiyah.or.id

Muhammadiyah menunjukkan pragmatisme ekonomi yang berorientasi pada inovasi teknologi dan efisiensi. Pragmatisme mereka tidak langsung tertuju pada ekstraksi SDA, melainkan pada pengembangan amal usaha yang berkelanjutan. Munculnya narasi tentang “ACMU” (AC Muhammadiyah ramah lingkungan) dan “Becak Listrik” adalah bukti dialektika pragmatisme hijau.

Kalaupun Muhammadiyah membuka kemungkinan pengelolaan tambang, wacana yang dibangun adalah pragmatisme yang “bersyarat” dan “seksama”. Dialektika yang dibangun adalah: kemandirian ekonomi harus dicapai melalui cara-cara yang tidak mencoreng integritas organisasi. Muhammadiyah lebih memilih menonjolkan “Audit Energi” dan “Ekonomi Hijau” sebagai solusi kemandirian yang lebih selaras dengan visi Islam Berkemajuan.

¹⁷⁴ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*.

Tabel 14. Dialektika Pragmatisme Inovatif Pada Portal Muhammadiyah.or.id

Unsur Dialektika	Temuan Wacana (Nodes NVivo)	Konsekuensi Kognisi Sosial
Tuntutan Riil	Kemandirian amal usaha, pemberdayaan dhuafa.	Mendorong ormas untuk tetap produktif namun tetap pada koridor etika lingkungan.
Justifikasi Ekonomi	Inovasi AC ramah lingkungan, Becak listrik.	Membangun persepsi bahwa kemandirian bisa dicapai melalui kreativitas teknologi, bukan hanya ekstraksi.
Independensi Finansial	<i>“Bukan untuk MLH, tapi untuk masyarakat”</i> .	Menjaga jarak dari kesan keserakahan ekonomi dengan menekankan manfaat bagi kelompok rentan.
Sintesis Wacana	Ekonomi Inovatif = Kemandirian Etis.	Memperkuat identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang modern, mandiri, dan peduli lingkungan.

Analisis terhadap dimensi kognisi sosial dalam portal *Muhammadiyah.or.id* menunjukkan adanya konstruksi “Pragmatisme Inovatif” yang berorientasi pada kemandirian ekonomi berbasis teknologi dan efisiensi. Strategi pertama terlihat pada upaya organisasi untuk melakukan justifikasi ekonomi melalui produk teknologi ramah lingkungan guna membangun citra modernitas. Hal ini teridentifikasi dalam promosi hasil riset universitas, di mana portal tersebut menyatakan bahwa, Muhammadiyah berdayakan Paguyuban Abang Becak melalui Becak Listrik (Betrik) 1912 sebagai gerakan promosi transportasi ramah lingkungan .

Berdasarkan KBBI, kata “pragmatisme” diartikan sebagai kepercayaan bahwa kebenaran suatu ajaran adalah kemampuannya memberikan hasil yang bermanfaat secara praktis. Secara kritis, munculnya narasi tentang “Becak Listrik” (MD-13) dan “ACMU” (MD-08) merupakan bukti dialektika pragmatisme hijau; Muhammadiyah menegosiasikan konsep Tajdid (pembaruan) ke dalam artefak teknologi, yang dalam jurnal *Islamic Socio-Entrepreneurship* disebut sebagai strategi mengubah modal spiritual menjadi modal ekonomi produktif.

Strategi kedua melibatkan konstruksi pragmatisme bersyarat dalam merespons kebijakan industri ekstraktif untuk menjaga marwah organisasi. Muhammadiyah tidak langsung menolak peluang ekonomi besar, namun membingkainya dengan bahasa birokratis yang sangat ketat. Hal ini nampak dalam pernyataan pimpinan pusat bahwa,

*“Keputusan resmi tersebut diambil oleh Muhammadiyah melalui pertimbangan yang **seksama** dan dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” (MD-15).*

Merujuk pada KBBI, kata “seksama” (saksama) berarti teliti, cermat, atau saksama.¹⁷⁵ Secara diskursif, penggunaan leksikon “seksama” dan “bersyarat” berfungsi untuk menciptakan jaring pengaman reputasi. Dialektika yang dibangun adalah kemandirian ekonomi harus dicapai melalui cara-cara yang tidak mencoreng integritas persyarikatan, sehingga keterlibatan dalam tambang dikonstruksi bukan sebagai bentuk keserakahan, melainkan sebagai “Uji Kelayakan Moral” atas kebijakan negara.

Strategi ketiga adalah penggeseran fokus dari ekstraksi sumber daya alam menuju ekonomi manajerial yang berbasis pada efisiensi internal. Muhammadiyah lebih memilih menonjolkan solusi teknokratis daripada eksploitasi lahan, sebagaimana tercermin dalam instruksi bahwa:

*“MLH (Majelis Lingkungan Hidup) telah melakukan **audit energi** terhadap organisasi maupun Uin Usaha Muhammadiyah (AUM) sebagai solusi kemandirian yang selaras dengan visi Islam Berkemajuan” (MD-12).*

Kata “audit” menurut KBBI adalah pemeriksaan pembukuan atau pengujian kebenaran. Analisis kritis menunjukkan bahwa Muhammadiyah sedang melakukan hegemoni manajerial terhadap ribuan institusinya. Dengan menggunakan standar “Audit Energi”, Muhammadiyah membangun persepsi bahwa kemandirian bisa dicapai melalui kreativitas teknologi dan penghematan biaya operasional, bukan hanya melalui ekstraksi SDA. Ini merupakan bentuk

¹⁷⁵ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

disiplin organisasi yang ingin menunjukkan bahwa mereka adalah aktor ekonomi yang lebih bertanggung jawab dibandingkan entitas korporat murni.

Terakhir, pragmatisme inovatif Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan independensi finansial yang altruistik, dimana keuntungan materi selalu dikaitkan dengan kepentingan kelompok rentan. Narasi ini dipertegas dengan klaim bahwa,

*“Program ini sebenarnya bukan untuk MLH PP Muhammadiyah, tapi memang untuk **masyarakat** dan lingkungan hidup itu sendiri,” (MD-12).*

Berdasarkan KBBI, kata “Masyarakat” didefinisikan sebagai sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu. Secara kritis, penggunaan pola kalimat kontras “bukan untuk... tapi untuk...” merupakan strategi *Discursive Altruism* (Altruisme Diskursif). Muhammadiyah sengaja melakukan penjarakan (distansi) dari kesan organisasi yang oportunistik atau padat modal.¹⁷⁶ Penegasan bahwa manfaat ditujukan langsung kepada “masyarakat dan lingkungan” berfungsi untuk mengamankan Legitimasi Moral. Hal ini selaras dengan konsep *Social Entrepreneurship* dalam sosiologi agama, dimana produktivitas ekonomi organisasi dilegitimasi bukan melalui akumulasi kekayaan institusi, melainkan melalui Redistribusi Kesejahteraan Sosial.¹⁷⁷ Dengan cara ini, publik dan jemaah diyakinkan bahwa produktivitas ekonomi Muhammadiyah tetap

¹⁷⁶ Estrella Gualda, *Altruism, Solidarity and Responsibility from a Committed Sociology: Contributions to Society*, Volume 53, pages 29–43 (2022).

¹⁷⁷ Melinda Nur Aisyah, *Peran Muhammadiyah Dan Sosial Entrepreneurship Bagi Masyarakat: Bisnis Yang Berdampak Sosial*, 2025.

berada pada koridor etika lingkungan, yang memberikan ruang bagi organisasi untuk beraliansi dengan kekuatan modal tanpa kehilangan kedaulatan ideologisnya.

4.3.2.3.3. Kesimpulan perbandingan Kognisi Sosial

Pada dimensi kognisi sosial yang meliputi instruksi organisasi, negosiasi *Green Islam*, dan pragmatisme ekonomi, dapat disimpulkan bahwa kedua portal merepresentasikan dua cara organisasi Islam memaknai relasi agama, alam, dan kepentingan institusional. Pada *Nu.or.id*, instruksi organisasi cenderung diarahkan untuk membangun kesiapan menerima peran baru sebagai aktor ekonomi, sementara *Green Islam* dinegosiasikan ke dalam kerangka mitigatif dan antroposentris, sehingga nilai ekologis tidak lagi berfungsi sebagai alat resistensi, melainkan sebagai instrumen pembenaran atas tambang yang dianggap dapat dikelola secara etis. Pragmatisme ekonomi pun tampil dominan sebagai dasar rasionalisasi demi kemandirian dan kesejahteraan umat.

Sebaliknya, pada *Muhammadiyah.or.id*, instruksi organisasi lebih menonjolkan otonomi, kehati-hatian, audit, dan pengukuran kemampuan diri; *Green Islam* dipertahankan sebagai kontrol moral terhadap eksploitasi, dan orientasi ekonomi ditempatkan di bawah kendali etik, bukan sebagai nilai dominan. Oleh karena itu, pada level mezo dapat ditegaskan bahwa *Nu.or.id* merepresentasikan model kognisi sosial “kemitraan-kesejahteraan”, sedangkan *Muhammadiyah.or.id* merepresentasikan model “kritis-keberlanjutan”, yakni perbedaan antara organisasi yang lebih siap berintegrasi dengan logika pembangunan ekstraktif dan organisasi yang berupaya menjaga jarak moral terhadapnya.

4.3.3. Analisis Dimensi Konteks Sosial (Level Makro)

Analisis level makro merupakan puncak dari kerangka Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, yang menghubungkan teks dan kognisi individu dengan struktur sosial serta institusional yang lebih luas. Pada dimensi ini, wacana dipandang bukan sekadar transmisi pesan, melainkan sebuah praktik kekuasaan (*power practice*) yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi, membangun legitimasi, atau melakukan resistensi terhadap kebijakan tertentu. Fokus utama dalam analisis makro isu ekstraktivisme ini adalah untuk memetakan bagaimana portal resmi organisasi Islam merespons realitas sosiopolitik nasional pasca penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan karpet merah bagi ormas keagamaan untuk mengelola wilayah pertambangan.

Konteks sosial ini melibatkan tarik-ulur kepentingan yang kompleks antara negara sebagai pemilik otoritas konsesi, organisasi massa (ormas) sebagai representasi masyarakat sipil yang kini bertransformasi menjadi pengelola industri, serta publik luas yang bertindak sebagai pengawas ekologis. Peneliti mendalami bagaimana portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* digunakan sebagai instrumen komunikasi strategis untuk menjaga batas-batas kewibawaan institusional, melakukan manajemen krisis atas keresahan publik, serta menegosiasikan posisi tawar (*bargaining power*) mereka dalam relasi kuasa yang sering kali bersifat asimetris dengan otoritas negara.

4.3.3.1. Respons terhadap Kritik Publik

Kritik publik merupakan tantangan yang berat bagi legitimasi moral organisasi keagamaan ketika mereka memutuskan untuk terjun ke sektor industri yang secara inheren destruktif seperti pertambangan. Wacana yang diproduksi di portal resmi berfungsi sebagai tameng diskursif untuk menangkis stigma negatif dan meyakinkan konstituen (jemaah) bahwa organisasi tetap berada pada jalur kemaslahatan.

4.3.3.3.1 Strategi Resiliensi dan Kanalisasi Kritik pada *Nu.or.id*

Wacana pada portal *Nu.or.id* menunjukkan pola respons yang bersifat resiliensi defensif namun cerdas dalam melakukan kanalisasi. Alih-alih membungkam suara kritis secara total, portal NU cenderung melakukan “normalisasi kritik” dengan menyebutnya sebagai bagian dari dinamika politik yang sehat. Implikasi dari strategi ini adalah untuk menurunkan tensi penolakan publik dengan memberikan kesan bahwa NU adalah organisasi yang inklusif dan demokratis.

Contoh paling nyata terlihat dalam fragmen wacana kasus Raja Ampat. Ketika kebijakan tambang nikel memicu tagar #SaveRajaAmpat di media sosial, portal NU memfasilitasi suara kritis dari tokoh internal seperti Savic Ali dan Yenny Wahid. Strategi ini merupakan bentuk “manajemen citra” yang bertujuan untuk meredam persepsi bahwa PBNU telah sepenuhnya terkooptasi oleh kepentingan rezim. Dengan memuat suara kritis dari dalam, NU berhasil menjaga legitimasi portal sebagai media yang “berimbang”, meskipun garis kebijakan resmi organisasi

tetap pada posisi menerima konsesi. Namun, portal NU juga melakukan serangan balik melalui diksi “Hoaks 1.000 persen” atau “Fitnah Keji” (ketika kritik tersebut menyerang aliran dana secara personal kepada institusi, yang menunjukkan adanya garis merah dalam toleransi wacana mereka.

Tabel 15. Perluasan Analisis Respons Kritik Pada Portal Nu.or.id

Strategi Respons	Temuan Narasi (Nodes NVivo)	Implikasi dan Konsekuensi Makro
Normalisasi Kritik	<i>“Kritik adalah sesuatu yang baik”, “Dinamika politik”</i>	Memosisikan organisasi sebagai entitas demokratis guna mendinginkan tensi publik dan menghindari citra otoriter.
Distansi Institusional	<i>“Urusan bisnis pribadi bukan urusan PBNU”</i>	Melindungi marwah institusi dengan melokalisir isu skandal ke tingkat individu pengurus.
Kanalisis Narasi	Memuat suara kritis Savic Ali dan Yenny Wahid terkait Raja Ampat.	Memberikan katup pengaman bagi kekecewaan warga NU agar tidak berujung pada pengunduran diri massal.
Defensif-Agresif	<i>“Tudingan yang sangat keji”, “Hoaks 1.000 persen”</i>	Digunakan untuk menghentikan spekulasi publik yang dapat merusak kredibilitas pengelolaan dana umat.

Pembingkaiian Solusi	“ <i>Tambang adalah solusi kemandirian</i> ”	Mengalihkan debat ekologis ke debat kesejahteraan untuk mendapatkan persetujuan jemaah.
-------------------------	--	---

Temuan data menunjukkan bahwa portal *Nu.or.id* sering kali memuat narasi bahwa “Kritik adalah sesuatu yang baik” dan menyebut penolakan sebagai “Dinamika politik yang sehat”.

Secara teoritis, ini merupakan penerapan strategi Bolstering dalam *Image Restoration Theory* oleh William Benoit.¹⁷⁸ Dengan menerima kritik sebagai bagian dari demokrasi, organisasi sedang memperkuat sifat positifnya sebagai entitas yang inklusif. Secara makro, strategi ini berfungsi untuk menghindari citra otoriter. Namun, di balik itu, terdapat upaya netralisasi Kritik, dimana kritik tidak dijawab secara substantif, melainkan hanya diakui keberadaannya sebagai “hiasan” demokrasi guna menurunkan tensi kemarahan jemaah di akar rumput.

Kasus Raja Ampat (NU-13 hingga NU-17) menjadi contoh nyata bagaimana portal ini memfasilitasi suara kritis dari tokoh internal seperti Savic Ali dan Yenny Wahid saat tagar #SaveRajaAmpat ramai dibicarakan.

Peneliti melihat fenomena ini melalui kacamata *Safety Valve Theory* (Lewis Coser). Dengan memberikan panggung bagi tokoh internal untuk mengkritik, PBNU sedang menyediakan “katup pengaman” agar kekecewaan warga NU tidak

¹⁷⁸ Benoit, W. L, *Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies.*, 1995, <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2672359>.

meledak menjadi gerakan pengunduran diri massal atau boikot institusi. Secara kritis, ini adalah strategi *Co-optation* oleh Selznick, dimana unsur-unsur oposisi ditarik masuk ke dalam kanal resmi agar protes mereka tetap berada dalam kendali institusi.¹⁷⁹ Meskipun portal tampak “berimbang”, garis kebijakan resmi organisasi tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa kritik tersebut hanya berfungsi sebagai manajemen citra alih-alih perubahan arah kebijakan.

Narasi yang memisahkan antara “Urusan bisnis pribadi” dengan “Urusan PBNU” mencerminkan upaya organisasi untuk melindungi marwah institusi dari skandal individu pengurus. Strategi ini dalam sosiologi organisasi disebut sebagai *Decoupling*. Organisasi berusaha memisahkan struktur intinya yang suci (nilai-nilai keulamaan) dari aktivitas operasionalnya yang profan (bisnis tambang). Menurut Benoit, ini adalah teknik *Shifting the Blame* atau pencarian kambing hitam.¹⁸⁰ Dengan melokalisir isu skandal ke tingkat individu, PBNU secara makro tetap mempertahankan klaim kebersihannya, seolah-olah kebijakan tambang adalah kebijakan yang bersih namun ternodai hanya oleh segelintir individu.

Sikap portal NU berubah drastis menjadi agresif ketika kritik menyerang aspek aliran dana personal dengan diksi seperti “Saya jamin 1.000 persen hoaks” (NU-17) atau “Fitnah” (NU-17). Perubahan nada ini menunjukkan adanya Garis Merah Diskursif. Berdasarkan teori *Crisis Communication*, respon agresif digunakan ketika ancaman telah menyentuh *Core Credibility* (kredibilitas inti),

¹⁷⁹ Philip Selznick, *TVA and the Grass Roots; A Study in the Sociology of Formal Organization.*, Pp. ix, 274. (Berkeley and Los Angeles: University of California Press., 1949).

¹⁸⁰ Benoit, W. L, *Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies.*

yakni pengelolaan dana umat.¹⁸¹ Disini, organisasi tidak lagi menggunakan persuasi, melainkan Serangan Balik untuk menghentikan spekulasi publik. Hal ini membuktikan bahwa toleransi NU terhadap kritik bersifat terbatas; kritik diperbolehkan selama menyentuh isu lingkungan (yang bisa dikanalisis), namun akan dihabisi secara diskursif jika menyentuh integritas finansial elit.

4.3.3.3.2. Strategi Preventif dan Rasionalitas Prosedural pada *Muhammadiyah.or.id*

Muhammadiyah.or.id menggunakan pendekatan yang bersifat "preventif-intelektual". Strategi utama mereka adalah menggunakan waktu sebagai alat negosiasi, yang diwakili oleh diksi "Seksama" dan "Tidak Tergegesa-geges". Dengan menunda keputusan final melalui proses kajian lintas majelis, Muhammadiyah berhasil menghindari benturan langsung dengan masyarakat sipil di awal kebijakan. Portal ini memosisikan dirinya bukan sebagai pendukung kebijakan, melainkan sebagai "laboratorium etika" yang sedang menguji kelayakan tawaran negara.

Muhammadiyah secara konsisten menonjolkan aspek integritas melalui pelibatan pakar dan aktivis lingkungan dalam produksinya. Konsekuensi dari strategi ini adalah terciptanya citra Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki "kedamaian intelektual". Mereka menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada riset mendalam (*science-based*), sehingga jika

¹⁸¹ Fairuza Arindra, 'THE SITUATIONAL CRISIS COMMUNICATION THEORY: STUDI LITERATUR', *SEMINAR NASIONAL HASIL RISET DAN PENGABDIAN*, 2024.

nantinya mereka menerima, itu adalah hasil pertimbangan matang; dan jika mereka menolak, itu adalah bukti independensi moral mereka (MD-15).

Tabel 16. Perluasan Analisis Respons Kritik Pada Portal Muhammadiyah.or.id

Strategi Respons	Temuan Narasi (Nodes NVivo)	Implikasi dan Konsekuensi Makro
<i>Strategic Delay</i>	<i>“Tidak akan tergesa-gesa”, “Dibahas dengan seksama”</i>	Meredam potensi resistensi publik dengan memberikan kesan organisasi yang penuh pertimbangan.
Intelektualisasi	Melibatkan FGD pakar dan rekomendasi kebijakan	Menggeser debat dari ranah emosional/politis ke ranah ilmiah untuk menjaga kewibawaan ormas.
Moral High Ground	<i>“Siap mengembalikan IUP jika lebih banyak mafsadat”</i>	Membangun posisi tawar moral bahwa organisasi tidak bisa "dibeli" dan tetap memiliki opsi keluar.

Advokasi Lintas Iman	Kerjasama dengan <i>Greenfaith</i> dan gerakan global	Memperkuat legitimasi sebagai aktor global dalam isu perubahan iklim, melampaui isu domestik.
Narasi Transparansi	“ <i>Membuka diri untuk bersinergi dengan semua pihak</i> ”	Mengundang partisipasi publik sebagai saksi dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Strategi utama yang teridentifikasi adalah penggunaan waktu sebagai instrumen untuk meredam resistensi publik. Hal ini direpresentasikan melalui diksi kunci “Saksama” (MD-03) dan “Tidak Tergesa-gesa” (MD-15). Berdasarkan KBBI, kata “saksama” didefinisikan sebagai teliti, cermat, atau akurat.¹⁸² Secara kritis, penekanan pada ketelitian ini merupakan bentuk *Intentional Delay* (Penundaan yang disengaja untuk memitigasi resiko. Mengacu pada penelitian Dong, aktor sering kali menyamarkan penundaan strategis di balik alasan prosedural atau administratif guna menjaga “*plausible deniability*” (penyangkalan yang masuk akal).¹⁸³

¹⁸² DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹⁸³ Dong, H., *The Politics of Delay in Crisis Negotiations.*, 69(5), 793–813. (2024), <https://doi.org/10.1177/00220027241267777>.

Muhammadiyah menyajikan proses kajian lintas majelis sebagai alasan “eksogen” (prosedur internal yang tak terhindarkan) untuk menunda keputusan final. Strategi ini berfungsi untuk memberikan jarak aman bagi organisasi dari tekanan opini publik yang reaktif. Sebagaimana argumen Dong, penundaan ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan modal informasi dan dukungan intelektual sebelum mengambil sikap final, sehingga mencegah serangan preventif berupa kritik tajam atau mosi tidak percaya dari masyarakat sipil di fase awal kebijakan.¹⁸⁴

Muhammadiyah secara konsisten menonjolkan aspek integritas melalui pelibatan pakar dan aktivis lingkungan dalam setiap produksinya. Strategi ini disebut sebagai Intelektualisasi, dimana organisasi menggeser debat publik dari ranah emosional-politis ke ranah ilmiah. KBBI mengartikan “pakar” sebagai orang yang ahli dalam suatu bidang ilmu.¹⁸⁵ Analisis kritis menunjukkan bahwa penyebutan gelar akademik secara berulang bertujuan untuk membangun *Epistemic Community* (Komunitas Epistemik) sebagaimana teori Peter M. Haas (1992).¹⁸⁶

Konsekuensi dari strategi ini adalah terciptanya citra Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki “kedamaian intelektual”. Mereka menunjukkan bahwa setiap langkah didasarkan pada riset mendalam (*science-based*). Hal ini memberikan pesan makro bahwa: jika nantinya mereka menerima kebijakan

¹⁸⁴ Dong, H., *The Politics of Delay in Crisis Negotiations*.

¹⁸⁵ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

¹⁸⁶ Peter M. Haas, *Epistemic Communities and International Policy Coordination*.

tersebut, itu adalah hasil pertimbangan saintifik yang matang, dan jika mereka menolak, itu adalah bukti independensi moral yang tak terbantahkan.

Terakhir, portal ini membangun narasi *Moral High Ground* (Otoritas Moral Tertinggi) melalui pernyataan kesiapan untuk membatalkan keterlibatan jika ditemukan dampak negatif yang masif. Hal ini teridentifikasi dalam klaim bahwa:

“Muhammadiyah siap mengembalikan izin jika ternyata lebih banyak mafsadat bagi lingkungan,” (MD-15)

Kata “mafsadat” dalam KBBI diartikan sebagai kerusakan atau kerugian.¹⁸⁷ Secara kritis, penggunaan istilah “mafsadat” (terminologi hukum Islam) di tengah perbincangan industri ekstraktif adalah upaya Negosiasi Ideologis. Muhammadiyah sedang membangun posisi tawar bahwa organisasi mereka tidak bisa dibeli dan tetap memiliki opsi keluar. Hal ini selaras dengan teori *Legitimacy Management* dari Suchman, dimana organisasi membangun legitimasi moral dengan menunjukkan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal di atas keuntungan materi sesaat.

4.3.3.2. Strategi Menjaga Legitimasi Institusi

Dalam konteks sosiologi agama, legitimasi institusi sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk menghubungkan kepentingan duniawi dengan nilai-nilai ukhrawi. Isu ekstraktivisme menjadi arena di mana kedua organisasi mencoba merumuskan ulang identitas mereka di mata konstituen.

¹⁸⁷ DigitalOcean, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*.

4.3.3.2.1. Legitimasi *Nu.or.id*

NU membangun legitimasi melalui narasi “Keadilan bagi Kelompok Marginal”. Strategi ini menggunakan konsep *Affirmative Policy* sebagai alat komunikasi makro untuk menyatakan bahwa sudah saatnya organisasi keagamaan (rakyat) ikut menikmati kekayaan alam yang selama ini hanya dikuasai korporasi asing atau segelintir elit. Dengan membingkai tambang sebagai “Rezeki untuk Kemandirian”, NU mencoba menyentuh sentimen nasionalisme ekonomi jemaahnya. Legitimasi ini diperkuat dengan landasan fiqih dari ulama besar (Syekh Wahbah Az-Zuhaili), yang memberikan “stempel halal” secara diskursif bagi keterlibatan ormas di sektor ekstraktif.

Tabel 17. Strategi Legitimasi Institusi Pada Portal *Nu.or.id*

Basis Legitimasi	Temuan Wacana (Nodes NVivo)	Dampak Sosiopolitik pada Jemaah
Keadilan Ekonomi	<i>“Redistribusi tambang dilakukan secara adil”</i>	Menimbulkan rasa berdaulat di kalangan warga NU atas sumber daya alam milik negara.
Kemandirian Umat	<i>“Melahirkan kemandirian ormas”, “Membiayai layanan umat”</i> .	Menggeser keraguan etis jemaah menjadi harapan akan manfaat sosial di bidang pendidikan/dakwah.
Otoritas Ulama	Penggunaan kitab fiqih otoritatif.	Mematikan debat kritis di tingkat akar rumput karena

		keputusan dianggap telah memiliki dasar syar'i.
Heroisme Institusi	“Langkah berani Presiden”, “LPOI sebagai garda terdepan”.	Membangun kebanggaan bahwa ormas memiliki peran vital dalam pembangunan nasional.

Legitimasi pertama dibangun melalui klaim bahwa keterlibatan organisasi dalam sektor tambang adalah langkah untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat. Strategi ini menggunakan konsep *Affirmative Policy* sebagai alat komunikasi untuk menyatakan bahwa sudah saatnya rakyat (melalui organisasi keagamaan) ikut menikmati kekayaan alam.

“Redistribusi tambang dilakukan secara adil agar kekayaan alam tidak hanya dikuasai korporasi asing atau segelintir elit.” (NU-04)

Secara makro, narasi ini merupakan bentuk *Resource Nationalism* (Nasionalisme Sumber Daya). Menurut Martinez-Alier, narasi keadilan ekonomi sering digunakan untuk membenarkan akses eksploitasi dengan membenturkannya pada korporasi asing atau elit.¹⁸⁸ Dengan menekankan kata “Redistribusi” (KBBI: pendistribusian kembali), narasi ini membangun rasa berdaulat di kalangan warga NU atas sumber daya alam milik negara. Secara kritis, strategi ini mengubah wajah industri ekstraktif yang destruktif menjadi sebuah gerakan kerakyatan yang heroik,

¹⁸⁸ Joan Martinez-Alier, *The Environmentalism of the Poor*.

sehingga mengalihkan fokus pembaca dari risiko krisis lingkungan menuju kebanggaan identitas ekonomi kolektif.

Legitimasi kedua bersifat fungsional, di mana tambang dicitrakan sebagai instrumen untuk memutus rantai ketergantungan finansial organisasi melalui narasi kemandirian. Dimana, langkah ini bertujuan melahirkan kemandirian ormas dan membiayai layanan umat di bidang pendidikan dan dakwah.

Peneliti melihat adanya upaya Religiusifikasi Profit. Dalam perspektif Pierre Bourdieu mengenai Symbolic Power, organisasi sedang melakukan konversi modal ekonomi menjadi modal simbolis.¹⁸⁹ Dengan menjanjikan bahwa hasil tambang akan digunakan untuk “Membiayai layanan umat”, portal ini berhasil menggeser keraguan etis jemaah menjadi harapan akan manfaat sosial. Strategi ini menciptakan *Logic of Utility* (Logika Kegunaan) yang sangat kuat: menolak tambang dicitrakan sama dengan menghambat kemandirian dakwah. Hal ini secara efektif membungkam kritik lingkungan karena isu ekologi diletakkan di bawah kepentingan keberlangsungan institusi.

Puncak dari strategi legitimasi adalah penggunaan otoritas teologis melalui rujukan kitab fiqh dan tokoh ulama otoritatif seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili.

Secara kritis, ini adalah *strategi Authorization* (Otorisasi) melalui jalur *Authority of Tradition and Religion*. Pemberian “Stempel halal” secara diskursif ini berfungsi sebagai perisai yang mematikan debat kritis di tingkat jemaah.¹⁹⁰ Dalam budaya organisasi yang hierarkis, penggunaan landasan syar'i menciptakan

¹⁸⁹ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*.

¹⁹⁰ Theo van Leeuwen, *Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis*.

Heuristika Kepatuhan. Dampaknya, rakyat cenderung menerima keputusan elit tanpa mempertanyakan validitas data lingkungan, karena kebijakan ekonomi tersebut telah disucikan melalui teks keagamaan yang dianggap absolut.

Portal NU juga membangun legitimasi melalui pengakuan terhadap agensi pemimpin negara dan posisi organisasi sebagai garda terdepan pembangunan.

“Kebijakan ini merupakan langkah berani Presiden Joko Widodo, dan LPOI sebagai garda terdepan siap mengawal pembangunan nasional.” (NU-01)

Narasi heroisme ini bertujuan untuk membangun kebanggaan kolektif warga bahwa organisasi mereka memiliki peran vital di tingkat nasional. Secara makro, sinergi wacana antara institusi agama dan otoritas politik bertujuan untuk menciptakan stabilitas (hegemoni). Menurut Fairclough, dengan memuji keberanian pemerintah, portal NU sekaligus melegitimasi posisinya sendiri sebagai mitra strategis negara yang sah.¹⁹¹ Hal ini memberikan kepuasan sosiopolitik bagi jemaah bahwa ormas mereka tidak hanya mengurus masalah agama, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam kedaulatan sumber daya alam bangsa.

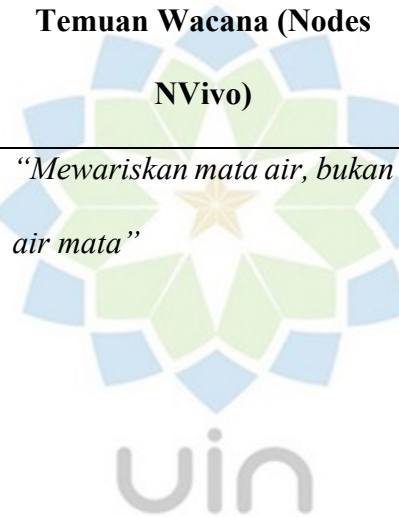
4.3.3.2.2. Legitimasi *Muhammadiyah.or.id*

Muhammadiyah menjaga legitimasi dengan menonjolkan konsistensi antara wacana dan aksi nyata di bidang lingkungan. Strategi ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa Muhammadiyah adalah “Penjaga Moral” yang tidak

¹⁹¹ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critic Study of Language*.

akan tergiur oleh keuntungan finansial semata. Dengan menonjolkan keberhasilan program seperti “Eco-Masjid” dan penghargaan Kalpataru, Muhammadiyah membangun legitimasi berbasis kompetensi dan etika. Wacana “Mata air bukan air mata” menjadi slogan yang sangat efektif dalam menjaga basis dukungan dari generasi muda yang lebih peduli pada isu krisis iklim.

Tabel 18. Strategi Legitimasi Institusi Pada Portal Muhammadiyah.or.id

Basis Legitimasi	Temuan Wacana (Nodes NVivo)	Dampak Sosiopolitik pada Jemaah
Integritas Moral	 <p><i>“Mewariskan mata air, bukan air mata”</i></p>	Mengukuhkan identitas jemaah sebagai kelompok "Islam Berkemajuan" yang visioner dan etis.
Kemandirian Kreatif	<p><i>“ACMU ramah lingkungan”, “Becak Listrik”</i></p>	Membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bisa dicapai lewat inovasi sains, bukan hanya ekstraksi.
Legitimasi Global	<p><i>Kerjasama dengan British Embassy/FCDO.</i></p>	Menunjukkan bahwa Muhammadiyah diakui sebagai mitra strategis

		internasional dalam isu lingkungan.
Kepribadian Ormas	“ <i>Sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah</i> ”\	Mengingatka n warga Muhammadiyah akan khittah perjuangan yang independen dan berhati-hati.

Analisis pada level makro menunjukkan bahwa *Muhammadiyah.or.id* secara sistematis membangun “Legitimasi Moral” melalui konsistensi antara wacana teologis dan aksi nyata di lapangan. Strategi pertama adalah pengukuhan identitas melalui integritas moral yang visioner. Hal ini nampak dalam penggunaan slogan emosional dalam teks yang menegaskan bahwa,

“*Generasi mendatang memiliki hak yang sama untuk menikmati bumi yang sehat*” (MD-11)

Secara kritis, strategi ini selaras dengan konsep *Moral Legitimacy* dari Mark Suchman, dimana institusi mencari dukungan dengan mengevaluasi secara normatif apakah aktivitas mereka adalah hal yang benar untuk dilakukan.¹⁹² Dengan mbingkai isu lingkungan sebagai kewarisan antargenerasi, Muhammadiyah berhasil mengamankan basis dukungan dari generasi muda (Gen Z dan Milenial)

¹⁹² Mark C. Suchman, *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*, 20, No. 3 (1955), <https://doi.org/10.2307/258788>.

yang memiliki tingkat keresahan ekologis tinggi, sekaligus membedakan dirinya dari organisasi lain yang mungkin hanya fokus pada aspek ritual-formal.

Strategi kedua adalah pembangunan legitimasi berbasis Kemandirian Kreatif guna menunjukkan kompetensi teknokratis organisasi di luar urusan agama. Muhammadiyah tidak hanya bicara ayat, tetapi menunjukkan bukti material melalui inovasi teknologi, sebagaimana tercermin dalam narasi bahwa:

“Muhammadiyah berdayakan Paguyuban Abang Becak melalui Becak Listrik (Betrik) sebagai gerakan promosi transportasi ramah lingkungan,” (MD-13)

Dalam diskursus sosiologi organisasi, hal ini disebut sebagai pencapaian *Cognitive Legitimacy*, di mana organisasi diterima publik karena dianggap memiliki solusi teknis yang masuk akal atas problem sosial. Melalui hilirisasi riset universitas (seperti Betrik dan ACMU), Muhammadiyah membangun persepsi bahwa kemandirian ekonomi umat bisa dicapai lewat kreativitas sains, bukan sekadar ekstraksi sumber daya alam. Ini merupakan bentuk manuver untuk menjaga jarak dari kesan keserakahan ekonomi di tengah isu keterlibatan ormas dalam industri pertambangan.

Strategi ketiga melibatkan pencarian Legitimasi Global untuk memperkuat posisi tawar di tingkat nasional. Strategi ini teridentifikasi melalui publikasi kemitraan internasional yang menekankan bahwa:

“Eco Bhinneka Muhammadiyah bersama GreenFaith Indonesia dan dukungan Pemerintah Inggris (FCDO) sukses menyelenggarakan diseminasi hasil advokasi lintas iman,” (MD-14).

Berdasarkan teori *Transnational Advocacy Networks* dari Keck dan Sikkink, kolaborasi dengan aktor luar negeri berfungsi sebagai bumerang untuk menekan otoritas domestik.¹⁹³ Dengan diakui sebagai mitra strategis kedutaan besar dan lembaga global, Muhammadiyah memperoleh modal simbolik yang sangat besar. Legitimasi global ini memberikan pesan kepada negara bahwa Muhammadiyah adalah aktor pembangunan yang kredibel dan setara dengan standar internasional, sehingga setiap kebijakan yang diambil organisasi memiliki perisai dukungan dunia internasional.

Terakhir, Muhammadiyah mempertahankan legitimasinya dengan menegaskan kepatuhan pada Khittah dan Kepribadian Organisasi sebagai benteng integritas. Hal ini terlihat pada klausul dalam keputusan strategis yang menyatakan bahwa:

“Kesiapan Muhammadiyah menerima IUP ini dilandasi pertimbangan pokok ingin menjadi role model pengelolaan yang tidak mengesampingkan aspek lingkungan dan keadilan,”
(MD-02).

Secara kritis, penggunaan istilah *role model* dan sesuai kepribadian merupakan upaya menjaga Organizational Identity agar tidak dianggap luntur oleh kepentingan pragmatis. Dalam kajian kebijakan publik, ini adalah bentuk *Social License to Operate* (Izin Sosial untuk Beroperasi), dimana Muhammadiyah

¹⁹³ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Keck Dan Sikkink (1998) Dirujuk Sebagai Transnational Advocacy Network (TAN).*, 1999, <https://courses.washington.edu/pbaf531/KeckSikkink.pdf>.

meyakinkan warga persyarikatan bahwa keterlibatan mereka dalam industri ekstraktif tetap berada dalam koridor Islam Berkemajuan. Strategi ini berfungsi untuk meredam potensi konflik internal dan memastikan bahwa loyalitas jemaah tetap utuh karena kebijakan organisasi dianggap tetap berlandaskan pada moralitas ketuhanan dan kepentingan umat.

4.3.3.3. Relasi Kuasa dengan Negara

Relasi kuasa adalah inti dari analisis makro. Di sini kita melihat bagaimana wacana merefleksikan posisi tawar organisasi: apakah mereka menjadi instrumen negara untuk melakukan normalisasi kebijakan, atau menjadi kekuatan penyeimbang (*check and balances*).

4.3.3.3.1. Relasi NU dan Negara

Portal *Nu.or.id* mencerminkan relasi yang bersifat simbiotik. NU memposisikan diri sebagai “pelaksana mandat”, Dalam perspektif van Dijk, ini adalah bentuk *Manufacturing Consent*, dimana organisasi keagamaan menggunakan otoritasnya untuk membantu negara memuluskan kebijakan yang kontroversial. Dengan menyebut negara sebagai pemberi “terobosan penting”, NU telah melakukan normalisasi atas kehadiran industri tambang dalam kehidupan keagamaan. Implikasinya, batas antara kepentingan negara dan kepentingan ormas menjadi semakin kabur dalam wacana di portal NU.

Tabel 19. Dinamika Relasi Kuasa Nu Dengan Negara

Karakter Relasi	Temuan Diskursif (Nodes)	Implikasi dalam Struktur Kuasa
Akomodatif	“PBNU berterima kasih kepada Presiden”	Ormas berperan sebagai pendukung utama kebijakan pemerintah (sekutu strategis).
Distributif	“Pemerintah memberikan mandat kepada ormas”	Relasi kuasa yang didasarkan pada pembagian akses ekonomi terhadap kekayaan negara.
Hegemonik	“Negara tidak boleh kalah dengan siapa pun”	Memperkuat otoritas negara untuk mengelola SDA demi kepentingan yang disebut sebagai "rakyat".
Lembaga Humas	Sosialisasi masif PP No. 25/2024.	Portal resmi ormas berfungsi sebagai kanal informasi sekunder bagi kebijakan pemerintah.

Media ini secara konsisten memposisikan organisasi sebagai mitra yang patuh terhadap penugasan negara. Strategi ini menggunakan bahasa birokrasi untuk memberikan bobot legal dan sakral pada kebijakan ekonomi ekstraktif yang kontroversial. NU memposisikan diri sebagai pelaksana mandat dari negara dalam pengelolaan sumber daya alam demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat luas.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahdatul Ulama untuk mengelolanya” (NU-01)

Secara makro, penggunaan diksi “dimandatkan” merupakan bentuk dari apa yang disebut Noam Chomsky sebagai *Manufacturing Consent* (pembentukan persetujuan).¹⁹⁴ Dalam skema ini, organisasi keagamaan menggunakan otoritas moral dan basis massa yang masif untuk membantu negara memuluskan kebijakan yang berisiko mendapatkan penolakan publik (seperti izin tambang ormas). Dengan mbingkai keterlibatan NU sebagai “tugas negara” (mandat), media internal organisasi berhasil mengubah persepsi publik: dari “ormas mengejar profit” menjadi “ormas menjalankan tugas mulia dari negara”. Implikasinya, kritik terhadap kebijakan tambang tersebut dicitrakan secara halus sebagai tindakan yang menghambat agenda nasional.

Relasi simbiotik ini diperkuat dengan cara memuji langkah-langkah politik pemerintah sebagai aksi heroik dan inovatif. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan

¹⁹⁴ Edward S. Herman and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent (The Political Economy of the Mass Media)*.

kesan destruktif dari industri pertambangan di wilayah-wilayah sensitif. Yang mana dalam teks ditemukan kalimat:

“Pemberian konsesi tambang bagi organisasi keagamaan merupakan ‘terobosan penting’ Presiden Joko Widodo untuk melibatkan rakyat dalam distribusi kekayaan alam.” (NU-01)

Peneliti melihat adanya upaya Intelektualisasi keuntungandalam narasi ini. Kata “Terobosan” digunakan untuk membungkus kebijakan diskriminatif yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sebagai sebuah inovasi kebijakan publik yang pro-rakyat. Secara sosiopolitik, portal *Nu.or.id* melakukan normalisasi atas kehadiran industri ekstraktif dalam kehidupan keagamaan. Dampak makronya adalah kaburnya batasan antara kepentingan profit korporasi dan fungsi penjagaan moral ormas. Wacana ini meyakinkan jemaah bahwa tambang bukan lagi ancaman ekologi, melainkan instrumen “rezeki teologis” yang disediakan oleh pemimpin negara yang adil, sehingga mematikan daya kritis akar rumput terhadap krisis iklim global.

Analisis makro juga menemukan pola relasi yang didasarkan pada distribusi akses ekonomi sebagai kompensasi atas dukungan politik dan stabilitas sosial yang disediakan oleh ormas:

“PBNU menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden atas kebijakan afirmasi yang memberikan konsensi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan.” (NU-01)

Kutipan ini mencerminkan relasi kuasa Akomodatif-Distributif. Secara kritis, ucapan “terima kasih” di ruang publik media resmi merupakan bentuk

pengakuan atas posisi *Patron-Client*. Negara (*Patron*) memberikan akses terhadap sumber daya alam (WIUPK), sementara ormas (*Client*) memberikan legitimasi moral dan jaminan soliditas massa. Strategi wacana ini bertujuan untuk membangun keyakinan di kalangan jemaah bahwa “negara memedulikan ormas”, padahal secara struktural hal ini merupakan bentuk *Institutional Capture*, dimana ormas ditarik ke dalam lingkaran kekuasaan untuk meminimalisir fungsi kontrol sosialnya.¹⁹⁵ Implikasinya, media *Nu.or.id* menjadi saluran untuk memperkuat otoritas negara dalam mengelola kekayaan alam, meskipun ada risiko kerusakan lingkungan yang nyata seperti di Pulau Gag atau Morowali.

Terakhir, relasi kuasa ini bermuara pada pengukuhan absolutisme otoritas negara atas sumber daya alam, dimana ormas bertindak sebagai perisai terhadap perlawanan sipil lainnya:

“Negara tidak boleh kalah dengan siapa pun. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Demikian halnya negara harus hadir untuk melindungi kepentingan sosial, kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi, serta secara seimbang dan berkelanjutan” (NU-05)

Peneliti menemukan adanya narasi Nasionalisme Sumber Daya (*Resource Nationalism*) yang bersifat hegemonik. Dengan menyebut “negara tidak boleh kalah”, *Nu.or.id* secara sadar memarginalkan suara-suara kritis dari kelompok masyarakat adat atau aktivis lingkungan yang seringkali berhadapan langsung dengan proyek negara. Secara makro, wacana ini memberikan legitimasi bagi

¹⁹⁵ Nicholas Chesterley and Paolo Roberti, *Populism and Institutional Capture*, Volume 53 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2017.06.004>.

negara untuk bertindak represif atau otoriter atas nama “kedaulatan”, karena tindakan tersebut telah diberkati oleh dukungan organisasi keagamaan terbesar. Relasi ini menunjukkan bahwa NU telah bertransformasi menjadi *State Apparatus* (aparatus negara) secara diskursif, yang bertugas meredam fragmentasi opini publik terkait industri ekstraktif demi stabilitas ekonomi-politik nasional.

4.3.3.3.2. Relasi Muhammadiyah dan Negara

Muhammadiyah memposisikan diri dalam relasi yang lebih negosiatif dan kritis. Mereka tidak ragu untuk mendesak pemerintah agar mengambil “langkah nyata” dalam pemulihan krisis lingkungan. Muhammadiyah menekankan bahwa izin tambang adalah “wewenang pemerintah”, sebuah pernyataan yang secara diskursif melepaskan tanggung jawab moral organisasi atas asal-muasal kebijakan tersebut. Muhammadiyah menuntut pemerintah untuk melibatkan kelompok disabilitas dan rentan dalam setiap kebijakan lingkungan, yang menunjukkan bahwa mereka mencoba mengoreksi jalannya kekuasaan negara agar lebih inklusif.

Tabel 20. Dinamika Relasi Kuasa Muhammadiyah Dengan Negara

Karakter Relasi	Temuan Diskursif (Nodes)	Implikasi dalam Struktur Kuasa
Kritis	“ <i>Mendesak pemerintah pemulihan krisis lingkungan</i> ”.	Menjaga jarak diskursif dengan negara agar tetap memiliki ruang kritik yang kredibel.

Watchdog	“Agama menjadi penjaga moral lingkungan”.	Memosisikan ormas sebagai pengawas yang memantau penyimpangan dalam kebijakan ekstraktif.
Independen	“Muhammadiyah tidak asal menerima soal tambang”.	Menunjukkan bahwa organisasi memiliki kedaulatan penuh di atas tekanan politik/ekonomi negara.
Korektif	Memberikan rekomendasi kebijakan resmi.	Berusaha mengintervensi struktur kekuasaan melalui jalur intelektual dan legal formal.

Analisis pada level makro terhadap portal *Muhammadiyah.or.id* menunjukkan konstruksi relasi yang bersifat negosiatif-kritis, di mana organisasi memosisikan diri sebagai penyeimbang kekuatan negara (*check and balances*). Karakter relasi pertama adalah Kritik Transformatif terhadap kelambanan birokrasi dalam menangani ekologi. Hal ini terlihat dalam narasi yang menyatakan bahwa:

“Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata menyelesaikan krisis lingkungan,” (MD-05).

Secara kritis, strategi ini selaras dengan konsep *Civil Society as Watchdog*, dimana organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas kebijakan publik.

Muhammadiyah menggunakan modal moralnya untuk menekan negara agar tidak hanya berhenti pada retorika kebijakan, melainkan pada implementasi teknis. Dengan mendesak “langkah nyata”, Muhammadiyah menjaga jarak diskursif dengan pemerintah guna memastikan bahwa kewibawaan organisasi tetap terjaga di mata publik sebagai entitas yang independen.

Karakter relasi kedua melibatkan strategi Pelepasan Tanggung Jawab Moral (*Discursive Shielding*) atas asal-muasal kebijakan kontroversial. Strategi ini teridentifikasi dalam pernyataan pimpinan pusat yang menekankan bahwa:

“mengenai izin tambang tersebut, hal itu merupakan sepenuhnya wewenang Pemerintah,” (MD-03).

Dalam kacamata Analisis Wacana Kritis, penyebutan “wewenang pemerintah” berfungsi untuk memindahkan beban tanggung jawab awal kebijakan dari pundak ormas ke pundak negara. Menurut penelitian tentang *Discourse and Power* oleh Teun A. van Dijk, strategi ini digunakan untuk melindungi legitimasi organisasi agar tidak dipandang sebagai peminta konsesi atau kolaborator pragmatis.¹⁹⁶ Dengan membingkai negara sebagai pemegang otoritas tunggal, Muhammadiyah memberikan kesan bahwa keterlibatan mereka hanyalah respons atas regulasi negara, bukan pengejaran keuntungan ekonomi secara proaktif.

Karakter relasi ketiga nampak dalam upaya Koreksi Terhadap Kekuasaan guna mendorong inklusivitas kebijakan. Muhammadiyah sering kali melakukan intervensi diskursif dengan menuntut agar negara memperhatikan kelompok yang terpinggirkan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan bahwa, Pemerintah perlu

¹⁹⁶ Teun A Van Dijk, *Discourse and Power* (PALGRAVE MACMILLAN, 2008), <https://doi.org/10.1007/978-1-137-07299-3>.

melibatkan kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam setiap perumusan kebijakan lingkungan hidup, sebagaimana terdapat pada teks (MD-14).

Secara sosiopolitik, tindakan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sedang melakukan *State-Society Synergy* namun dengan posisi tawar yang superior. Muhammadiyah mencoba mengoreksi jalannya kekuasaan negara yang seringkali teknokratis-elitist menjadi lebih inklusif. Hal ini mempertegas posisi Muhammadiyah sebagai lembaga otoritas etis yang bertugas memastikan bahwa pembangunan nasional tidak melampaui batas-batas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Terakhir, relasi ini dikukuhkan melalui Formalisasi Rekomendasi sebagai instrumen lobi intelektual. Strategi ini terwujud melalui publikasi yang menegaskan bahwa:

“Hasil kerja advokasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan lingkungan yang diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah,” (MD-14).

Berdasarkan teori *Epistemic Authority*, Muhammadiyah tidak lagi melawan negara dengan aksi jalanan, melainkan dengan “kertas kebijakan” atau *policy paper*. Melalui jalur intelektual dan legal formal ini, Muhammadiyah mencoba mengintervensi struktur kekuasaan dari dalam sistem. Implikasi makronya adalah terciptanya citra Muhammadiyah sebagai mitra strategis yang berdaulat; mereka mendukung agenda kemajuan bangsa namun tetap memiliki otoritas untuk memberikan lampu kuning jika kebijakan negara dianggap membawa mafsadat bagi rakyat dan alam semesta.

4.3.3.3.3. Kesimpulan Analisis Makro

Pada dimensi konteks sosial yang mencakup kritik publik, legitimasi institusi, dan relasi kuasa, dapat disimpulkan bahwa portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* menjalankan strategi komunikasi yang berbeda dalam menghadapi tekanan sosial-politik pasca kebijakan WIUPK. *Nu.or.id* cenderung mengelola kritik publik secara defensif namun adaptif, yakni dengan menormalisasi kritik sebagai bagian dari dinamika demokratis, sembari tetap mempertahankan posisi organisasi yang akomodatif terhadap kebijakan negara. Pada saat yang sama, portal ini bekerja untuk memperkuat legitimasi institusional NU sebagai mitra strategis negara yang sah dalam agenda kesejahteraan dan redistribusi sumber daya.

Sebaliknya, *Muhammadiyah.or.id* lebih menampilkan strategi legitimasi yang berbasis integritas moral, rasionalitas prosedural, dan tanggung jawab ekologis, sehingga relasi kuasa dengan negara tidak dibingkai sebagai kemitraan yang sepenuhnya akomodatif, melainkan sebagai hubungan yang tetap menyisakan jarak kritis. Dengan demikian, pada level makro dapat ditegaskan bahwa *Nu.or.id* lebih berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik untuk meneguhkan posisi organisasi dalam orbit kekuasaan negara, sedangkan *Muhammadiyah.or.id* lebih berfungsi sebagai instrumen komunikasi moral untuk menjaga kewibawaan etis organisasi di tengah tekanan kebijakan ekstraktif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi Islam pada isu ekstraktivisme bukan sekadar respons terhadap tambang, tetapi juga arena perebutan legitimasi, posisi tawar, dan identitas kelembagaan di hadapan negara dan publik

4.4. Perbandingan Visual (*Matrix Coding Query* Nvivo)

Melalui fitur *Matrix Coding Query* pada NVivo 15, peneliti melakukan pemetaan intensitas koding untuk melihat frekuensi kemunculan tema secara komparatif antara kedua portal. Visualisasi ini memberikan bukti empiris yang objektif mengenai prioritas diskursif yang dibangun oleh masing-masing institusi dalam menanggapi isu WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Tabel 21. Perbandingan Intensitas Kode (*Matrix Query*)

Kategori Node	<i>NU.or.id</i> (Intensitas)	<i>Muhammadiyah.or.id</i> (Intensitas)	Dominasi Wacana	Implikasi Diskursif
Pragmatisme Ekonomi	Sangat Tinggi	Rendah	<i>NU.or.id</i>	Fokus pada kemandirian finansial dan redistribusi modal.
Negosiasi <i>Green Islam</i>	Sedang	Sangat Tinggi	<i>Muhammadiyah.or.id</i>	Fokus pada integritas teologis dan kelestarian ekologis.
Relasi Kuasa Negara	Sangat Tinggi	Sedang	<i>NU.or.id</i>	Mencerminkan posisi sebagai “Mitra Strategis” pemerintah.

Kritik Publik	Tinggi	Sedang	<i>NU.or.id</i> (<i>Defensif</i>)	Berupaya meredam friksi internal (misal: kasus Raja Ampat).
Inovasi Hijau	Rendah	Sangat Tinggi	<i>Muhammadiyah.or.id</i>	Menunjukkan dakwah berbasis solusi teknologi (ACMU/Betrik).

Hasil *query* menunjukkan bahwa wacana pada portal *NU.or.id* sangat terkonsentrasi pada node “Relasi Kuasa Negara” dan “Pragmatisme Ekonomi”. Hal ini memvalidasi temuan bahwa NU menggunakan portal resminya sebagai instrumen komunikasi politik untuk melegitimasi posisi organisasi sebagai aktor ekonomi-politik yang sah. Tingginya intensitas pada “Kritik Publik” di portal NU mengindikasikan bahwa portal tersebut bekerja keras melakukan manajemen krisis diskursif guna menyeimbangkan suara tokoh internal (seperti Yenny Wahid dan Savic Ali) dengan garis kebijakan resmi PBNU yang akomodatif.

Sebaliknya, *Muhammadiyah.or.id* menunjukkan intensitas yang sangat tinggi pada node “Negosiasi *Green Islam*” dan “Inovasi Hijau”. Visualisasi data ini menegaskan bahwa Muhammadiyah lebih mengutamakan narasi “Kepemimpinan Peradaban” yang berbasis pada etika lingkungan daripada narasi “Kemandirian Material” jangka pendek. Muhammadiyah memposisikan teks mereka sebagai ruang edukasi, advokasi ekologis, dan panggung pameran solusi ekonomi hijau

(seperti Becak Listrik dan AC ramah lingkungan), yang secara visual terlihat dari keragaman koding pada isu-isu konservasi, energi terbarukan, dan audit energi organisasi.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Dialektika Struktur Teks

Analisis pada dimensi mikro menunjukkan adanya “perang terminologi” yang sangat kontras, yang mencerminkan skema kognitif serta posisi tawar masing-masing lembaga di hadapan negara. Portal *Nu.or.id* secara konsisten mengadopsi strategi leksikal yang bersifat "sakralisasi ekonomi" melalui penggunaan kata kunci seperti *Maslahah* dan *Affirmative Policy*. Hal ini selaras dengan teori representasi ideologi di mana media keagamaan cenderung membingkai isu sosial-politik melalui kacamata teologis untuk memmanufaktur persetujuan jemaah.¹⁹⁷

Secara lebih mendalam, pilihan diksi “Maslahah” oleh NU berfungsi sebagai *floating signifier* yang mampu menormalisasi aktivitas ekstraktif yang destruktif menjadi sebuah narasi “ibadah kolektif” demi pemberdayaan umat. Implikasinya, risiko kerusakan lingkungan (fasad) yang nyata di lapangan seringkali terpinggirkan (*backgrounding*) oleh narasi kemandirian finansial institusi. Struktur kalimat aktif yang digunakan secara masif di portal NU menunjukkan agensi institusional yang percaya diri, memosisikan diri sebagai aktor yang kapabel dalam mengelola “mandat suci” dari pemerintah.

¹⁹⁷ Muttaqin, ‘AGAMA DALAM REPRESENTASI IDEOLOGI MEDIA MASSA’.

Sebaliknya, *Muhammadiyah.or.id* menerapkan strategi “distansi etis” yang sangat tajam. Penggunaan leksikon risiko seperti *Mafsadat*, *Risiko*, dan tetap menggunakan istilah *Industri Ekstraktif* tanpa penghalusan bahasa, merupakan strategi diskursif untuk membangun kesadaran kritis jemaah. Melalui struktur sintaksis kondisional seperti penggunaan kata “apabila” dan “jika” terkait penerimaan konsesi Muhammadiyah menunjukkan bahwa posisi mereka tidaklah absolut dan sangat bergantung pada terpenuhinya kriteria etis-prosedural. Hal ini merupakan upaya eksplisit untuk melawan “paradigma ekstraktivis” yang cenderung memandang alam secara instrumental sebagai komoditas semata.¹⁹⁸ Muhammadiyah menggunakan bahasa sebagai instrumen “peringatan moral” yang menegaskan bahwa integritas ekosistem tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan material jangka pendek.

4.5.2. Representasi Kognisi Sosial: Negosiasi Ideologi *Green Islam*

Pada level mezo, proses produksi wacana di kedua portal merupakan manifestasi dari kognisi sosial kolektif atau representasi sosial yang dianut oleh masing-masing institusi. Temuan menunjukkan adanya perbenturan epistemologis yang signifikan dalam menginterpretasikan konsep *Green Islam*. Kognisi sosial NU sangat dipengaruhi oleh identitas historisnya sebagai "penjaga stabilitas nasional" dan desakan pragmatis untuk membiayai jaringan organisasi yang sangat masif. Akibatnya, ideologi *Green Islam* dalam wacana NU cenderung mengalami

¹⁹⁸ Sörlin, S, *The Extractivist Paradigm: Arctic Resources and the Planetary Mine. In Arctic Resources and the Planetary Mine.*

“segmentasi habitat”. Di sini, isu lingkungan tetap didukung pada level perilaku individu (mikro), namun dikompromikan pada level kebijakan industri (makro) demi “kemaslahatan distributif”.

Di sisi lain, kognisi Muhammadiyah merefleksikan etos “Islam Berkemajuan” yang mengutamakan rasionalitas, prosedur ilmiah, dan kemandirian kreatif.¹⁹⁹ Muhammadiyah menegosiasikan *Green Islam* sebagai identitas universal yang tidak dapat ditawar melalui metafora yang sangat kuat: “*Mewariskan mata air, bukan air mata*”. Dalam kaca mata komunikasi organisasi, Muhammadiyah melakukan strategi “pertunjukan” (*performance*) yang bersifat kolegal-konsultatif.²⁰⁰

Keberhasilan Muhammadiyah menonjolkan inovasi teknologi hijau seperti ACMU dan Becak Listrik di portal resminya bukan sekadar konten pelengkap, melainkan upaya diskursif untuk menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi bisa dicapai tanpa harus terjebak dalam “kutukan sumber daya” (*resource curse*). Hal ini menunjukkan adanya upaya negosiasi yang konsisten antara doktrin agama dan sains lingkungan.²⁰¹ Sebaliknya, kognisi NU yang cenderung “*sam’ina wa atha’na*” terhadap elit pengurus pusat mengakibatkan minimnya dialektika kritis di permukaan portal berita mereka, yang memperkuat kesan sentralisasi pesan demi soliditas organisasi.

¹⁹⁹ Syafi’i, A. R., *Moderasi Beragama Muhammadiyah Dalam Risalah Islam Berkemajuan: Perspektif Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim*.

²⁰⁰ Sumarni, L et al., *Modul Komunikasi Organisasi Berbasis Case Method & Project Based*.

²⁰¹ Izzatul Mardhiah et al., ‘Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyah’, *Jurnal Studi Al-Qur’an: Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani* Vol. 10, No. 1, (n.d.).

4.5.3. Kontestasi Konteks Sosial: Relasi Kuasa, Legitimasi, dan Krisis Ekstraktivisme

Dimensi makro atau konteks sosial mengungkap posisi tawar ormas Islam di tengah pusaran kebijakan hilirisasi nikel dan ambisi energi nasional. Melalui pendekatan Van Dijk,²⁰² wacana di portal *Nu.or.id* ditemukan menjalankan fungsi *manufacturing consent* atau pembangunan persetujuan jemaah terhadap kebijakan negara. NU memosisikan diri dalam relasi kuasa yang simbiotik-akomodatif, di mana mereka bertindak sebagai agen normalisasi bagi kebijakan tambang yang kontroversial. Dengan membingkai keterlibatan ormas sebagai bentuk “keadilan distributif” bagi kelompok marginal, NU berupaya melegitimasi posisi mereka sebagai sekutu strategis pemerintah (*state-aligned actors*).²⁰³ Konsekuensinya, kritik dari aktivis lingkungan (seperti JATAM atau WALHI) seringkali dibalas dengan narasi defensif yang menonjolkan aspek legalitas formal daripada keadilan ekologis.

Sebaliknya, *Muhammadiyah.or.id* memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang (*watchdog*) yang menjaga jarak kritis dari pusat kekuasaan. Melalui terminologi "keadilan ekologis" dan pelibatan suara aktivis lintas iman (seperti GreenFaith), Muhammadiyah melakukan resistensi diskursif terhadap hegemoni pembangunan yang bersifat eksploitatif.²⁰⁴ Strategi “kehati-hatian” Muhammadiyah merupakan upaya untuk memelihara legitimasi moral institusi agar

²⁰² Dijk, *The Handbook of Discourse Analysis, Second Edition*.

²⁰³ The Jakarta Post, ‘Another Muslim Group Declares Interest in Mining Concessions’.

²⁰⁴ Nasrullah et al., ‘Poskolonialisme Dan Ekologi Pascakolonial: Sebuah Tinjauan Pustaka’.

tidak luruh di mata publik internasional dan generasi muda yang semakin kritis terhadap krisis iklim.²⁰⁵

Perbedaan tajam ini mencerminkan dinamika sosiopolitik yang kompleks: di satu sisi, terdapat ormas yang memilih masuk ke dalam sistem untuk melakukan redistribusi akses ekonomi (NU), dan di sisi lain terdapat ormas yang memilih tetap di luar (atau di tepian) untuk menjaga integritas moral dan fungsi kontrol sosial (Muhammadiyah). Relasi kuasa antara negara dan ormas ini sangat memengaruhi bagaimana nasib lingkungan dan masyarakat adat di wilayah tambang (seperti kasus Raja Ampat atau Halmahera) direpresentasikan di ruang publik digital.²⁰⁶

4.5.4. Implikasi dan Reorientasi *Green Islam* dalam Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang mendalam bagi disiplin Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dengan mengajukan konsep “Reorientasi *Green Islam*” sebagai paradigma dakwah masa depan. Untuk itu, di era digital tidak lagi boleh terjebak pada narasi “kesalehan ritual” semata, melainkan harus bertransformasi menuju “kesalehan struktural”. Hal ini berarti media digital agama harus berani mengkritisi kebijakan ekonomi-politik yang berdampak pada kerusakan bumi ciptaan Tuhan, yang dalam perspektif ekologi pascakolonial sering disebut sebagai bentuk kekerasan epistemik terhadap alam dan manusia.²⁰⁷

²⁰⁵ Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY, ‘Muhammadiyah Dalam Ekstraktivisme Pertambangan: Kertas Posisi - Perspektif Multidisiplin’.

²⁰⁶ Putri, A. E et al., ‘Peran Hukum Lingkungan Dalam Menghadapi Ekstraktivisme Di Sektor Minyak, Gas, Dan Mineral Di Indonesia’.

²⁰⁷ Nasrullah et al., ‘Poskolonialisme Dan Ekologi Pascakolonial: Sebuah Tinjauan Pustaka’.

Temuan pada kasus Raja Ampat menunjukkan bahwa portal resmi ormas memiliki kemampuan *agenda setting* yang sangat besar untuk mengarahkan opini umat. Oleh karena itu, praktisi KPI memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa narasi “kemaslahatan” tidak disalahgunakan untuk menjustifikasi kerusakan ekologis. Sebagaimana diperingatkan oleh para aktivis, memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan bisa menjadi “masalah besar” alih-alih “masalah besar” jika tidak disertai dengan independensi editorial dan transparansi yang ketat.²⁰⁸

Sebagai simpulan dari pembahasan ini, wacana ekstraktivisme di media digital ormas Islam Indonesia merupakan dialektika antara idealisme teologis dan pragmatisme politik. Terdapat pembelahan paradigma antara “Antroposentrisme Pragmatis” pada NU yang melihat alam sebagai modal kesejahteraan manusia, dengan “Ekosentrisme Etis” pada Muhammadiyah yang melihat alam sebagai amanah suci yang harus diwariskan dalam kondisi baik bagi generasi mendatang.²⁰⁹ Rekonsiliasi antara kedua pandangan ini hanya mungkin terjadi jika media digital agama kembali ke khittahnya sebagai suara bagi mereka yang tak bersuara (*voice of the voiceless*), bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan dari ambisi kekuasaan dan modal.

²⁰⁸ Ridwanuddin, ‘Izin Tambang untuk Ormas, Masalah Besar bukan Masalah Besar’.

²⁰⁹ Putri, A. E et al., ‘Peran Hukum Lingkungan Dalam Menghadapi Ekstraktivisme Di Sektor Minyak, Gas, Dan Mineral Di Indonesia’.